BADAN POM

MMXXIII

LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2023

1500533 HALOBPOM

021-4241646

rorenkeu@pom.go.id

https://sites.google.com/view/rorenkeu-bpom/

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2023

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646 Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta rorenkeu@pom.go.id @birorenkeu.bpom

LEMBAR SENGAJA KOSONG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi di Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sepanjang tahun 2023.

Laporan Tahunan disusun dengan tujuan sebagai media bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi pelaksanaan kegiatan yang komprehensif di Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2023. Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan Tahunan ini berisikan narasi dan uraian, gambar, grafik dan tabel hasil kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2023. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dasar dan gambaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keberhasilan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengemban tugas dan amanatnya sangat didukung oleh peran aktif pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan serta kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja di Badan POM.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kami berharap semoga Laporan Tahunan 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama dan pemangku kepentingan terkait.

Jakarta, 1 Maret 2024
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN * REPUBLIK INDONESIA * BADAN POM

Ali Muharam

(021) 424-1646 Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta rorenkeu@pom.go.id @birorenkeu.bpom

LEMBAR SENGAJA KOSONG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL x

BAB. I: PENDAHULUAN 1

1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI 1

1.1.1 VISI 1

1.1.2 MISI 1

1.1.3 BUDAYA ORGANISASI 1

1.2 TUGAS POKOK, STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI 2

1.2.1 TUGAS POKOK 2

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI 4

1.2.3 FUNGSI 4

BAB 2: PENGELOLAAN SUMBER DAYA 9

2.1. SUMBER DAYA MANUSIA 9

2.1.1. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 9

2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN 10

2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA 11

2.1.4. KEBUTUHAN PEGAWAI 11

2.1.5. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM 13

2.2. SURAT MENYURAT 15

2.3. SARANA DAN PRASARANA 16

2.4. REALISASI ANGGARAN (Rincian per Kegiatan) T.A 2023 17

2.5. SASARAN MUTU BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023 21

2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023 23

BAB 3: HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2023 29

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 29

IKU 1: NILAI RB BPOM PENGUATAN AKUNTABILITAS 29
IKU 2: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN PENCAPAIAN KINERJA BPOM 38
IKU 3: NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BPOM 47
IKU 4: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPOM 53
IKU 5: PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISUSUN DENGAN SAP 57

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 62

IKU 6: INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 62

SASARAN KEGIATAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER SESUAI PEDOMAN 66

IKU 7: PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER TERHADAP PEDOMAN 66

SASARAN KEGIATAN 4: MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM 82

IKU 8: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR 82
IKU 9: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SETTAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR 107

SASARAN KEGIATAN 5: TERWUJUDNYA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG EFEKTIF 111

IKU 10: INDEKS REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 111

SASARAN KEGIATAN 6: TERWUJUDNYA SDM BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BERKINERJA OPTIMAL 115

IKU 11: INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 115

SASARAN KEGIATAN 7: MENGUATNYA DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 116

IKU 12: INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BAIK 116

SASARAN KEGIATAN 8: TERKELOLANYA KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SECARA AKUNTABEL 119

IKU 13: TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 119

BAB 4: PENUTUP 125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 4

Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Tingkat Pendidian Tahun 2023 10

Gambar 2. 3 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2023 10

Gambar 2. 4 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2023 11

Gambar 2. 5 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2015-2023 11

Gambar 2. 6 Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023 15

Gambar 2. 7 Perbandingan Capaian Realisasi dari tahun 2019-2023 17

Gambar 3. 2 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 .. 30

Gambar 3. 3 Kegiatan Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2023 35

Gambar 3. 4 Pembukaan dan pembahasan pada Rakernas BPOM Tahun 37

Gambar 3. 5 Tampilan Fitur Capaian RAPK UPT 39

Gambar 3. 6 Tampilan Tabel Hasil Sampling dan Pengujian yang Sudah Terintegrasi dengan SIPT 39

Gambar 3. 7 Tampilan Tabel Pada Aplikasi RHPK 40

Gambar 3. 8 Tampilan Form Tabel Pada Menu Manajemen Data 41

Gambar 3. 9 Tampilan Daftar Referensi Pada Menu Manajemen Data 41

Gambar 3. 10 Tampilan Fitur Capaian RAPK UPT Pada Akun Admin 42

Gambar 3. 11 Tampilan Monitoring Aliran Data API 42

Gambar 3. 12 Tampilan login SIMETRIS setelah pengembangan 43

Gambar 3. 13 Sasaran Strategis yang ditarik dari aplikasi KRISNA 44

Gambar 3. 14 Menu cetak dokumen PK 44

Gambar 3. 15 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun 2023 45

Gambar 3. 16 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan 46

Gambar 3. 17 Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Regional: (A) Regional 1, (B) Regional 2, (C) Regional 3, (D) Regional 4, (E) Regional 5 dan (F) Regional 6 49

Gambar 3. 18 Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi e-planning SIMETRIS (Daring) 50

Gambar 3. 19 Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi e-planning SIMETRIS (Luring) 50

Gambar 3. 20 Peserta Perencana dalam Forum Diskusi JFP mengusung tema “Peningkatan Awareness Peran Perencana dalam Mendukung Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan” 51

Gambar 3. 21 Fordis JFP "Penguatan Peran Perencana dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektifitas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan" 51

Gambar 3. 22 Peserta Fodis Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM : Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) 52

Gambar 3. 23 Kepala Biro Memimpin Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM 52

Gambar 3. 24 Workshop Ikpa dan Indikator Capaian Output 56

Gambar 3. 25 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan 2023 57

Gambar 3. 26 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022 *Unaudited* 59

Gambar 3. 27 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2023 59

Gambar 3. 28 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III TA 2023 60

Gambar 3. 29 Nilai Indeks Kepuasan Setiap Fungsi di Rorenkeu 63

Gambar 3. 30 Laporan Survei Kepuasan Layanan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Tahun 2022 64

Gambar 3. 31 Tren Hasil Survei IPP dan IPAK sepanjang tahun 2023 66

Gambar 3. 32 Keputusan Kepala BPOM Nomor 226 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 67

Gambar 3. 33 Sosialisasi Secara Hibrid tentang "Penyempurnaan Langkah Pengendalian Dalam Implementasi Renstra" 68

Gambar 3. 34 Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2024 69

Gambar 3. 35 Penyerahan Penghargaan Kepada Kepala Unit Kerja dalam Rapat Evaluasi Nasional 70

Gambar 3. 36 Paparan REN oleh Plt. Kepala BPOM 71

Gambar 3. 37 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM di Jambi, 6 - 8 Maret 2023. 73

Gambar 3. 38 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Medan, 7 – 9 Maret 2023. 73

Gambar 3. 39 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM di Tasikmalaya, 7 – 9 Maret 2023. 73

Gambar 3. 40 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Yogyakarta, 8 – 10 Juni 2023. 74

Gambar 3. 41 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kota Sorong, 14 - 17 Juli 2023 75

Gambar 3. 42 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Maluku, 14 – 17 Juli 2023 75

Gambar 3. 43 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Papua Selatan, 17 - 18 Februari 2023 76

Gambar 3. 44 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 28 – 29 Maret 2023 76

Gambar 3. 45 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Lampung, 28 – 29 Maret 2023 76

Gambar 3. 46 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 4 – 5 Oktober 2023 77

Gambar 3. 47 Pembahasan Usulan Tambahan Anggaran BPOM TA 2024, Bekasi, 18 Juli 2023. 79

Gambar 3. 48 Pembahasan Rekomendasi Alat Laboratorium oleh PPPOMN, Depok, 16 Juni 2023 79

Gambar 3. 49 Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2023 80

Gambar 3. 50 Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2023, Jakarta, 19 – 20 Januari 2023. 80

Gambar 3. 51 Buku Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE 81

Gambar 3. 52 Kegiatan *Capacity Building Leadership Dialogue* Tahun 2023 85

Gambar 3. 53 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan . 87

Gambar 3. 54 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2023 87

Gambar 3. 55 Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 88

Gambar 3. 56 Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan 89

Gambar 3. 57 Pertemuan Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045 89

Gambar 3. 58 *Online Coaching* Analisis Gender: Pendalaman Rancangan Awal *Gender Analysis Pathway* bersama Pakar 91

Gambar 3. 59 *Online Coaching Analysis Gender and Gender Budget Statement*..... 92

Gambar 3. 60 Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG BPOM..... 92

Gambar 3. 61 Foto Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota pokja PUG BPOM..... 93

Gambar 3. 62 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2024. 94

Gambar 3. 63 PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 94

Gambar 3. 64 Pemaparan Pengembangan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan 95

Gambar 3. 65 Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2024 97

Gambar 3. 66 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM 98

Gambar 3. 67 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota baik secara luring maupun daring 99

Gambar 3. 68 Pertemuan Monev Terpadu DAK Nonfisik BOK POM 100

Gambar 3. 69 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2023..... 100

Gambar 3. 70 Realisasi Anggaran DAK Nonfisik BOK POM per Kabupaten/Kota Tahun 2023 101

Gambar 3. 71 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2024 101

Gambar 3. 72 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2024 102

Gambar 3. 73 Siklus Hibah 104

Gambar 3. 74 .Monitoring dan Evaluasi Hibah 105

Gambar 3. 75 Buku Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023 108

Gambar 3. 76 Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 110

Gambar 3. 77 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2024 111

Gambar 3. 78 Rapat penyusunan MPH Biro Perencanaan dan Keuangan di Bekasi, 13 Februari 2024 114

Gambar 3. 79 Tangkapan Layar Siroum Data Pemeliharaan APD Tahun 2023 117

Gambar 3. 80 Indeks Pemanfaatan per Triwulan 118

Gambar 3. 81 Indeks Pemanfaatan Email Rorenkeu 2023 118

Gambar 3. 82 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Rorenkeu selama Tahun 2022 119

Gambar 3. 83 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024, Jakarta, 3 – 5 Oktober 2024 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 12

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 14

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana pada tahun 2023 16

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023 18

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 22

Tabel 2. 6 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 23

Tabel 3. 1 DAFTAR PESERTA MONEV DAN SUPERVISI REGIONAL 47

Tabel 3. 2 Hasil Analisis IPP dan IPAK Desember 2023 65

Tabel 3. 3 Data Hibah Uang 105

Tabel 3. 4 Data Hibah Barang 106

Tabel 3. 5 RENCANA TINDAK LANJUT RTM 2023 112

BAB I
PENDAHULUAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646
Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
rorenkeu@pom.go.id
@birorenkeu.bpom

BAB. I:
PENDAHULUAN

1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:

1.1.1 VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

1.1.2 MISI

- ✓ Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- ✓ Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- ✓ Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- ✓ Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.1.3 BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit penunjang menggunakan misi Badan POM untuk melakukan perencanaan tahunan maupun 5 (lima) tahunan dan memastikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Badan POM tertuang dalam dokumen perencanaan serta ketersediaan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator dan fasilitator harus memastikan

bahwa semua sumber daya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kinerja organisasi dipantau dan diukur baik indikator *output* maupun indikator *outcome* secara periodik. Mengingat sumber daya terbatas, Biro Perencanaan dan Keuangan harus bijaksana menetapkan prioritas, berdasarkan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, diperlukan Budaya Organisasi.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya organisasi dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

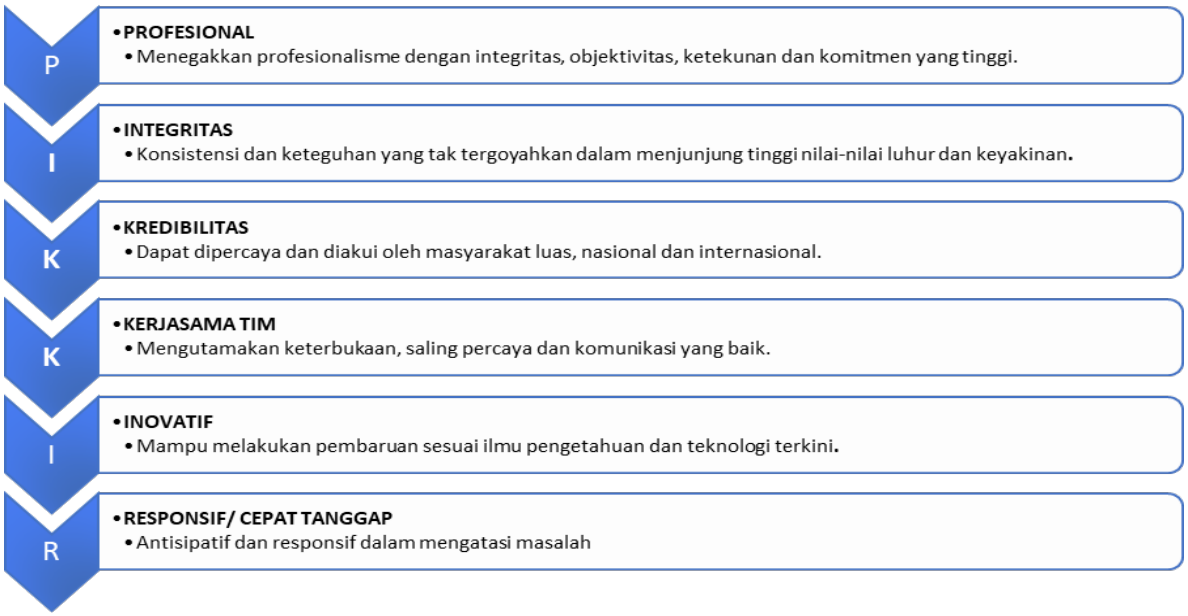

1.2 TUGAS POKOK, STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.

Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi bahan substansi strategis pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian fungsi organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional. Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan urusan daerah, dan pengelolaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri
d. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
e. penyiapan bahan koordinasi substansi strategis pimpinan
f. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, analisis dan penyusunan laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi, dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

1.2.3 FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2022, kemudian dalam melaksanakan fungsinya Biro Perencanaan dan Keuangan dibagi menjadi:

- ✓ **Fungsi Perencanaan**
- ✓ **Fungsi Penganggaran**
- ✓ **Fungsi Urusan Daerah dan Hibah**
- ✓ **Fungsi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja**
- ✓ **Fungsi Keuangan**
- ✓ **Sub Bagian Tata Usaha.**

  - ➢ **Fungsi Perencanaan** mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Substansi Perencanaan mempunyai 2 pekerjaan utama yakni:

- ✓ Rencana Strategis: melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang (Renstra/RPJMN), Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan dan kajian-kajian lainnya.
- ✓ Rencana Kerja Tahunan: melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana tahunan (Penyusunan RKT, PK, RAPK).

- ➢ **Fungsi Penganggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Fungsi Penganggaran menyelenggarakan: Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- ➢ **Fungsi Urusan Daerah dan Hibah** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan urusan daerah, dan pengelolaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri.
- ➢ **Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja organisasi di lingkungan BPOM
- ➢ **Fungsi Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Fungsi Keuangan menyelenggarakan:
  - ✓ Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan
  - ✓ Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM
  - ✓ Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM
  - ✓ Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- ➢ **Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan** berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 15 mempunyai tugas

melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu biro.

LEMBAR SENGAJA KOSONG

BAB II
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646 Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta rorenkeu@pom.go.id @birorenkeu.bpom

BAB 2:
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 5 (lima) Ketua Tim Koordinator dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jumlah pegawai pada akhir tahun 2023 terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 (dua puluh empat) orang pegawai tidak tetap (PPNPN).

Pada awal tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami dampak dari reorganisasi, sehingga terdapat perpindahan salah satu Substansi yaitu Dukungan Strategis Pimpinan sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai ke Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan. Pada bulan Oktober 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan 2 (dua) orang pegawai PPPK dan pada bulan November mendapatkan 4 (empat) orang pegawai PPPK, sehingga di akhir tahun ada penurunan jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari 60 orang menjadi 55 orang.

Selain PNS dan PPPK, jumlah PPPN juga mengalami perubahan. Pada awal tahun berjumlah 31 dari 34 karena berkurang 3 (tiga) pegawai Dukungan Strategis Pimpinan yang pindah ke Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan. Pada bulan Juni 2023, 1 (satu) pegawai PPNPN mengundurkan diri, bulan Oktober 2023, 3 (tiga) pegawai diterima PPPK dan pada bulan November 2023, 3 (tiga) pegawai diterima PPPK sehingga akhir Desember 2023, pegawai PPNPN berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

2.1.1. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

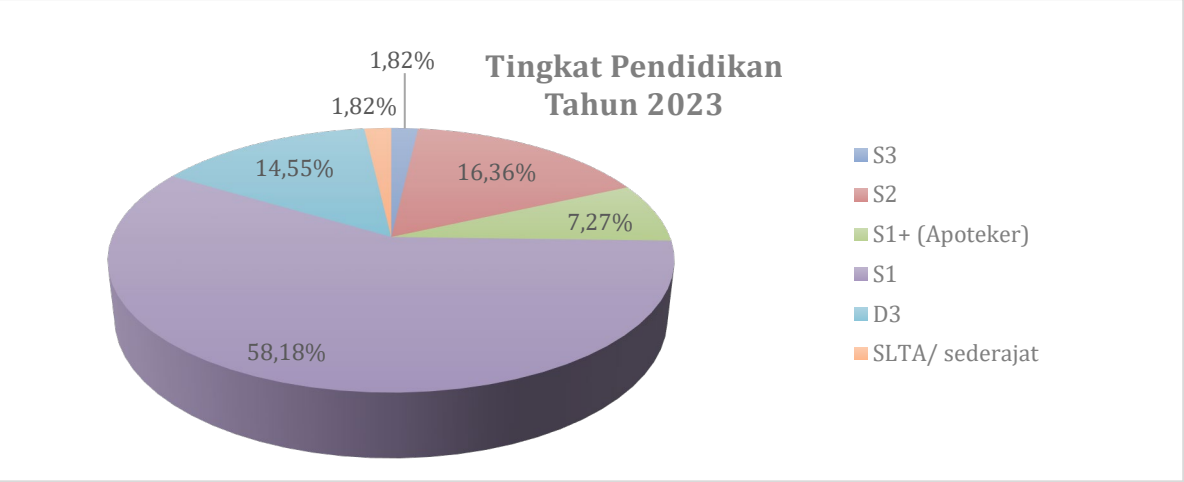

Gambar 2. 1 Grafik PNS berdasarkan Tingkat Pendidian Tahun 2023

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023, populasi terbesar pada tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 32 pegawai dengan persentase 58,18 % dari total pegawai.

2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Grafik data pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan bahwa dari 55 orang PNS, 2 diantaranya menduduki jabatan struktural, selain itu menduduki jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Di tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan tambahan 6 orang pegawai PPPK di bulan Oktober dan Desember, dengan jabatan 2 (dua) Analis Kebijakan Ahli Pertama, 3 (tiga) Perencana Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Arsiparis Terampil. Selain itu, ada 2 (dua) orang pegawai Analis Anggaran Ahli Muda dan Perencana Ahli Pertama yang mengikuti Tugas Belajar.

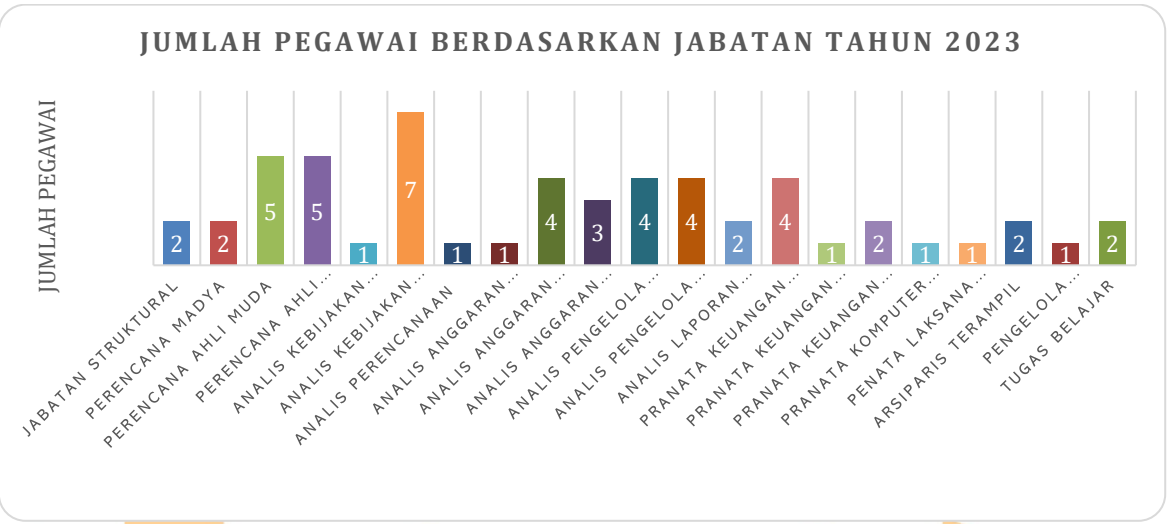

Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2023

2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan termuda berusia 23 tahun dan tertua 54 tahun dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:

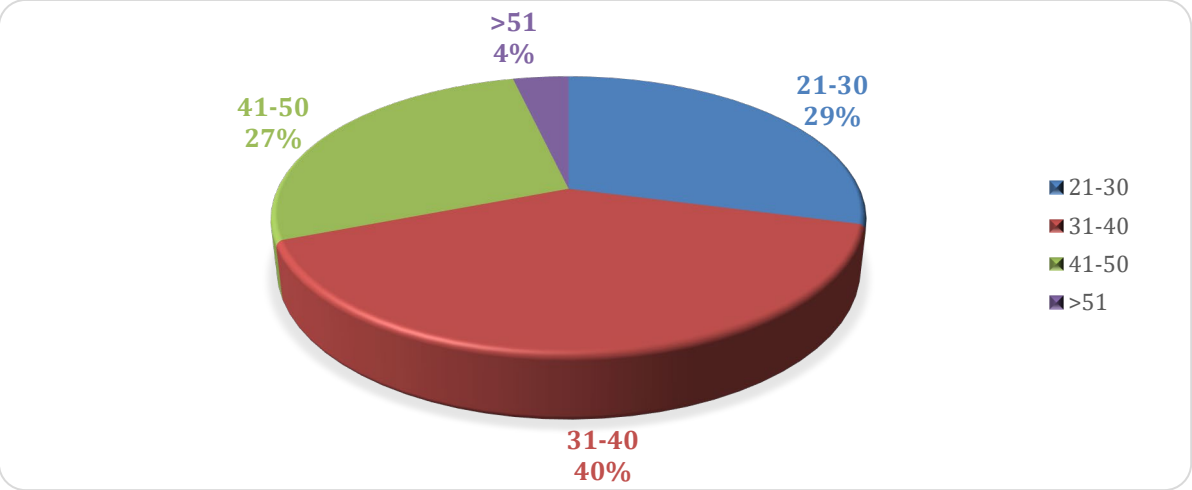

Gambar 2. 3 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2023

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, populasi terbesar PNS Biro Perencanaan dan Keuangan adalah usia 31-40 tahun yaitu sebesar 40%, diikuti oleh kelompok usia 21-30 tahun ke atas yaitu sebesar 29.09%.

2.1.4. KEBUTUHAN PEGAWAI

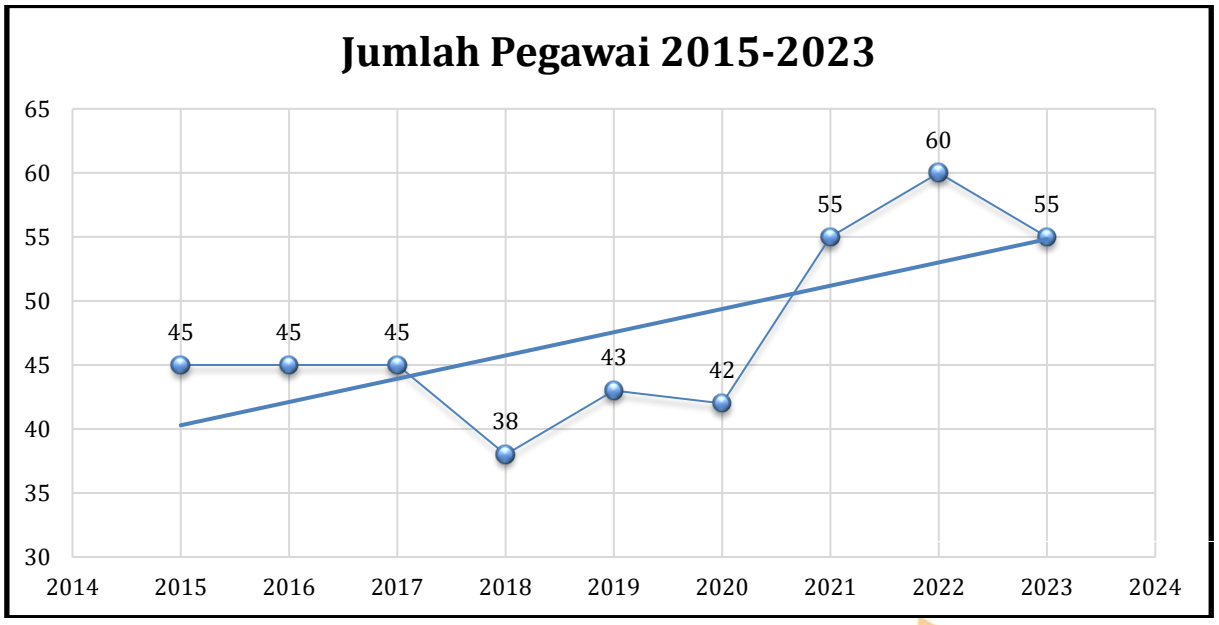

Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2015-2023

Pada awal tahun 2023, dampak dari reorganisasi Badan POM, salah satu Substansi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu Substansi Dukungan Strategis Pimpinan

(sejumlah 11 orang pegawai) pindah ke Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan sehingga pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari 60 (enam puluh) berkurang menjadi 49 (empat puluh sembilan) pegawai. Pada bulan Oktober 2023 Biro Perencanaan mendapatkan tambahan pegawai PPPK sebanyak 2 (dua) orang pegawai, dan bulan November 2023 mendapatkan tambahan pegawai PPPK sebanyak 4 (empat) orang pegawai sehingga sampai akhir tahun 2023 total pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah 55 (lima puluh lima) pegawai.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2023, kebutuhan SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
3	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
4	Arsiparis Penyelia	1	0	1
5	Arsiparis Mahir	2	0	2
6	Arsiparis Terampil	4	2	2
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
8	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
9	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	3	0	3
10	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	4	4	0
11	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	3	2
12	Analis Anggaran Ahli Madya	6	1	5
13	Analis Anggaran Ahli Muda	9	4	5
14	Analis Anggaran Ahli Pertama	9	2	7
15	Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
16	Analis Kebijakan Ahli Muda	5	0	5
17	Analis Kebijakan Ahli Pertama	11	7	4
18	Perencana Ahli Madya	7	2	5
19	Perencana Ahli Muda	10	4	6
20	Perencana Ahli Pertama	17	6	11
21	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
22	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
23	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
24	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	1	2
26	Pranata Keuangan APBN Mahir	3	2	1

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
27	Pranata Keuangan APBN Terampil	3	2	1
28	Analis Keuangan	3	3	0
29	Bendahara	1	1	0
30	Pelaksana	1	1	0
31	Analis Anggaran	1	1	0
32	Pranata Komputer Keahlian	1	1	0
33	Penata Laksana Barang	1	1	0
34	Analis Perencanaan	3	3	0
Total		**124**	**53**	**71**

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: KP.03.2.24.07.22.27 Tahun 2022 tentang Penataan Tenaga Non-ASN/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN. Pada tahun 2023, 3 (tiga) orang PPNPN pindah ke Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan, 6 (enam) orang PPNPN diterima menjadi pegawai PPPK, dan 1(satu) orang mengundurkan diri, sehingga pada akhir tahun PPNPN Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah 24 orang pegawai.

2.1.5. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Perencanaan dan Keuangan membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Sebagian besar tugas-tugas perencanaan seperti perencanaan jangka panjang dan strategis, pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, pengembangan metode dan sistem sampling, pengembangan sistem pengelolaan data terpadu, serta pengembangan sistem pelaporan membutuhkan analisis yang tajam dan mendalam. Oleh karena itu, disamping memerlukan penambahan jumlah SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial pegawai, baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan. Peningkatan kompetensi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sesuai dengan pedoman kompetensi yang ada.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) pegawai yang sedang menjalani masa Tugas Belajar, yaitu Didi Suryadi, S.E. dengan mengambil Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, LAN, Jakarta dan Okto Dasa Matra Suharjo, S.T. yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) dengan mengambil Program Studi Master Applied Geographic Information Systems pada National University of Singapore.

Sedangkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dapat dilaksanakan oleh semua pegawai secara mandiri melalui Aplikasi IDEAS yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2023, dari aplikasi SIASN, menu pengembangan kompetensi pada laporan diklat menunjukkan terdapat 774 jenis pelatihan yang diikuti oleh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. Beberapa pelatihan yang diikuti dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
1	Bimtek SAKIP dan Monev Online	Biro Perencanaan dan Keuangan	Cibubur, Jawa Barat	22 - 23 Mei 2023	16 orang
2	Bimtek Analisis gender	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta	3,5 Juli 2023 dan 12,14, 20 September 2023	10 orang
3	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2024	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Santika Premiere, Bekasi	2-3 Agustus 2023	26 orang
4	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-KL Alokasi Anggaran TA 2024	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Mangga Dua Square, Jakarta	3-5 Oktober 2023	27 orang
5	Sosialisasi Peraturan bagi Bendahara	PPSDM	Online (IDEAS)	8-9 Maret 2023	12 orang
6	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Best Western Premiere The Hive, Jakarta	13 - 30 November 2023	1 orang

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
7	E-Learning Manajemen Risiko	Biro Perencanaan dan Keuangan	IDEAS	sepanjang tahun 2023	55 orang
8	Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta	17 April 2023	41 rang

2.2. SURAT MENYURAT

Penerimaan surat masuk pada Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2023 telah sepenuhnya menggunakan Aplikasi Srikandi dengan total naskah sebanyak 5007 dokumen, terdiri atas 2983 naskah masuk, 1321 disposisi, dan 703 tembusan. Sementara itu, surat keluar dari Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 1687 dokumen, terdiri atas 1276 dokumen dengan tanda tangan Kepala Biro dan 411 dokumen dengan tanda tangan Sekretaris Utama.

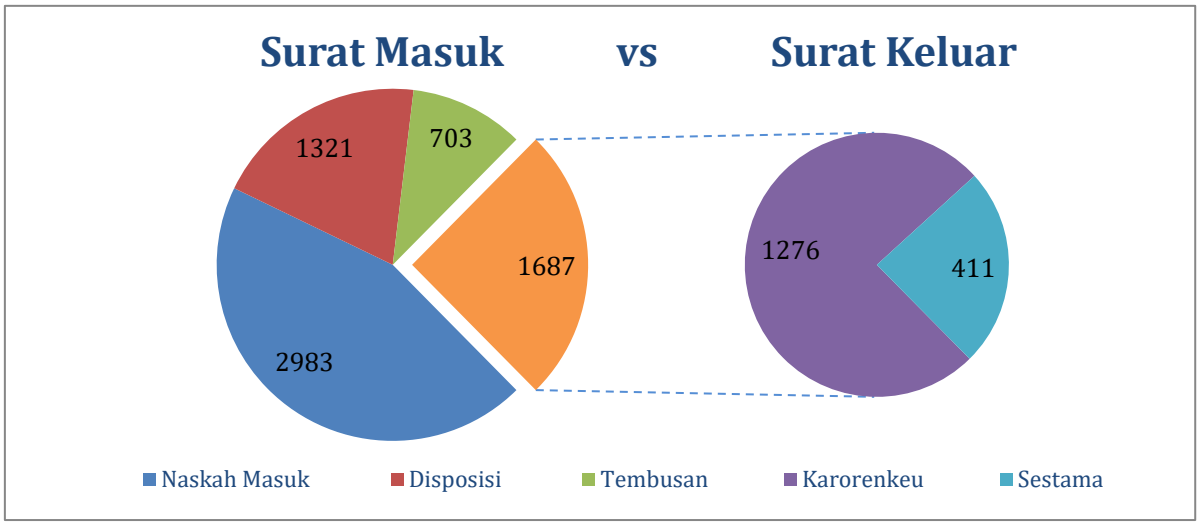

Gambar 2. 5 Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2023

Pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan memanfaatkan aplikasi Srikandi (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi) versi 2 untuk proses Surat Menyurat Internal dan SIPANDA (Sistem Penomoran Naskah Dinas) untuk penomoran dan klasifikasi berkas dokumennya.

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Adapun Sarana dan Prasarana pada tahun 2023 di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan pengadaan BMN yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana pada tahun 2023

No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Tim Kerja
1	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	233	Friska Loudwina Tarigan	Penganggaran
2	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	229	Yunita Herman, S.E	Penganggaran
3	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	232	Muhammad Rifki Al Ghifari	Penganggaran
4	Printer	Printer hp INC HP Color Laser jet pro m255NW	2023	3.10.02.03.003	929	Muhammad Rifki Al Ghifari	Penganggaran
5	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	230	Tri Apriadi, S.Si, Apt	Urusan Daerah dan Hibah
6	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	231	Evi Wirdayanti, SE, S.Psi, MM	Urusan Daerah dan Hibah
7	Laptop	Laptop ACER TRAVELMATE P214 CORE-I7 (TMP214/0006)	2023	3.10.01.02.002	228	Monicha Puspitasari	Urusan Daerah dan Hibah
8	P.C	PC AXIOO MYPC ONE PRO K5 (8N5)	2023	3.10.01.02.001	1136	Mawar Sari, SP	Urusan Daerah dan Hibah
9	Laptop	Laptop AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	234	Yulia K Riamina	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
10	Laptop	Laptop AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	235	Eka Nelly Agustien	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
11	Laptop	Laptop AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	236	Vicka	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Tim Kerja
12	Laptop	Laptop (AXIOO MYBOOK PRO K7 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	239	Irfan Mustofa, S.Kom	Sub Bagian Tata Usaha
13	Laptop	Laptop AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	237	Nunik Ekawaty, SE	Sub Bagian Tata Usaha
14	Laptop	Laptop AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9)	2023	3.10.01.02.002	238	Nunik Ekawaty, SE	Sub Bagian Tata Usaha
15	Laptop	Acer Core i7	2023	3.10.01.02.002	266	Denny Alan, S.Kom	Penganggaran
16	Printer	HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One	2023	3.10.02.03.003	941	Indry Puspitasari, SE	Keuangan
17	Printer	HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One	2023	3.10.02.03.003	942	Yoga Muliawan Purwanto, A.Md.Ak	Keuangan
18	Printer	HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One	2023	3.10.02.03.003	943	Naiva Tianli Ichsandhia,A.Md.Ak	Keuangan
19	Printer	HP OfficeJet 200 Mobile Printer	2023	3.10.02.03.003	937	Indry Puspitasari,SE	Keuangan

2.4. REALISASI ANGGARAN (Rincian per Kegiatan) T.A 2023

Pada tahun 2023, berdasarkan OMSPAN Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Biro Perencanaan dan keuangan adalah sebesar Rp. 20,578,974,000 untuk Belanja Barang dan Rp. 396,500,000 Belanja Modal sehingga totalnya **Rp. 20,975,474,000** sedangkan realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 20,946,341,879** sehingga jika dibandingkan dengan penyerapan tahun 2022, penyerapan Biro Perencanaan dan Keuangan menurun 0,01 poin dari 99,87% menjadi 99.86% (per 31 Desember 2023) namun tren capaian dari 5 tahun terakhir cenderung meningkat.

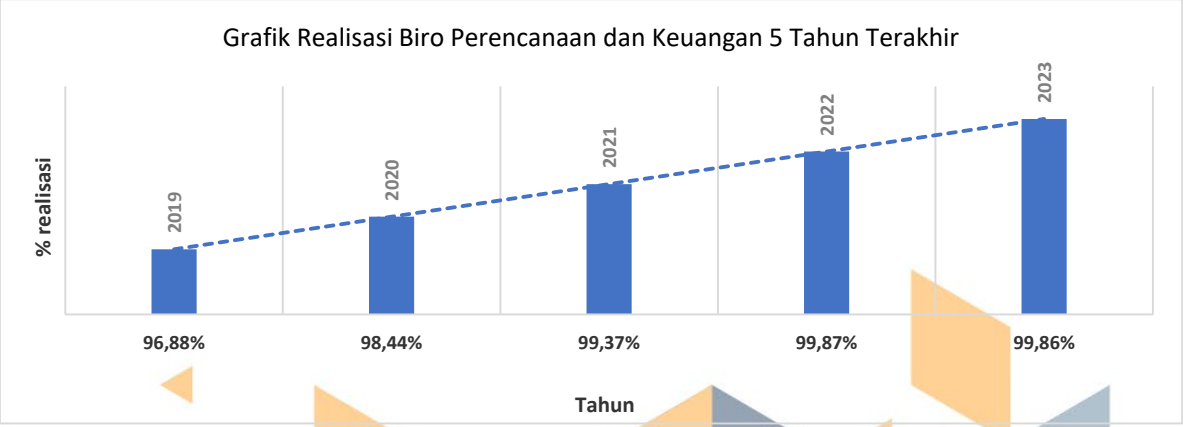

Gambar 2. 6 Perbandingan Capaian Realisasi dari tahun 2019-2023

Adapun realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan per kegiatan Tahun Anggaran 2023 capaiannya sebesar 99,96% cut-off tanggal 31 Desember 2023. Adapun detail realisasi tersebut dapat dilihat melalui matriks di bawah ini:

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Kode	Uraian/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/ Akun/ Detil	RM/ PNP	Pagu	REALISASI KEUANGAN	
				Rupiah (Rp)	%
3159	**Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan**		**20.997.974.000**	**20.967.511.131**	**99,96%**
3159.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		**2.490.974.000**	***2.486.028.964***	**99,80%**
3159.EBA.960	**Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**		**2.490.974.000**	***2.486.028.964***	**99,80%**
61	**Pengelolaan Kinerja Internal**		**2.490.974.000**	***2.486.028.964***	**99,80%**
A	PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	11.770.000	*11.770.000*	**100,00%**
B	KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	576.383.000	*574.271.313*	**99,63%**
C	PENGUATAN DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	279.554.000	*278.230.450*	**99,53%**
E	PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	579.614.000	*579.520.620*	**99,98%**
F	PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN QMS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	468.449.000	*468.306.851*	**99,97%**
G	PENATAAN ARSIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM	145.949.000	*145.948.520*	**100,00%**
H	PELAKSANAAN TATA KELOLA PERKANTORAN DAN KERUMAHTANGGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RM & PNP	291.020.000	*289.774.160*	**99,57%**
I	Implementasi Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Lingkup BPOM	RM	138.235.000	*138.207.050*	**99,98%**
3159.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**		18.507.000.000	***18.481.482.168***	**99,86%**
3159.EBD.952	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran**		**9.901.000.000**	***9.899.942.793***	**99,99%**
	Fungsi Perencanaan		**4.200.000.000**	***4.199.849.865***	**100,00%**

Kode	Uraian/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/ Akun/ Detil	RM/ PNP	Pagu	REALISASI KEUANGAN	
				Rupiah (Rp)	%
51	**Penyusunan rencana strategis dan analisis lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan**		**1.959.587.000**	***1.959.549.449***	**100,00%**
A	PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS BPOM 2025-2029	RM & PNP	458.168.000	*458.166.303*	**100,00%**
B	PENYUSUNAN DESAIN PERSIAPAN IMPLEMENTASI GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BLUE BOOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN)	RM & PNP	771.833.000	*771.831.862*	**100,00%**
C	PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	RM	25.860.000	*25.859.234*	**100,00%**
D	PEMBINAAN PERENCANA BPOM	RM & PNP	671.548.000	*671.545.465*	**100,00%**
E	PENYELENGGARAAN WFO/WFH KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN	PNP	32.178.000	*32.146.585*	**99,90%**
52	**Penyusunan rencana kerja**		**1.989.277.000**	***1.989.166.361***	**99,99%**
A	RAPAT KERJA NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	RM	379.084.000	*379.078.639*	**100,00%**
B	PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	RM & PNP	698.815.000	*698.813.595*	**100,00%**
C	PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PUG BPOM	RM & PNP	465.783.000	*465.781.199*	**100,00%**
D	KOORDINASI PERENCANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	RM & PNP	224.541.000	*224.540.025*	**100,00%**
E	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI	PNP	221.054.000	*220.952.903*	**99,95%**
53	**Supervisi perencanaan**		**251.136.000**	***251.134.055***	**100,00%**
A	ASISTENSI PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA	RM & PNP	251.136.000	*251.134.055*	**100,00%**
	Fungsi Penganggaran		**4.767.000.000**	***4.766.561.405***	**99,99%**
56	**Penyusunan dokumen penganggaran tahunan**		**3.817.398.000**	***3.817.029.744***	**99,99%**
B	SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL PAGU ANGGARAN	RM/PNP	981.504.000	*981.488.660*	**100,00%**
C	SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	RM/PNP	1.208.764.000	*1.208.481.914*	**99,98%**
D	PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA BADAN POM	RM	221.101.000	*221.086.691*	**99,99%**

Kode	Uraian/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/ Akun/ Detil	RM/ PNP	Pagu	REALISASI KEUANGAN	
				Rupiah (Rp)	%
E	KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR	RM	807.785.000	*807.754.946*	**100,00%**
F	PENYELARASAN PENGANGGARAN KEBIJAKAN BARU BPOM TA 2023	RM	417.546.000	*417.527.831*	**100,00%**
G	PENYELENGGARAAN WFH KELOMPOK SUBSTANSI PENGANGGARAN	RM	28.022.000	*28.013.702*	**99,97%**
H	Leadership Dialog BPOM 2023	RM	152.676.000	*152.676.000*	**100,00%**
57	**Penyusunan pedoman penganggaran**		**317.713.000**	***317.678.350***	**99,99%**
A	PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)	RM	33.600.000	*33.600.000*	**100,00%**
B	PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS	RM	284.113.000	*284.078.350*	**99,99%**
58	**Supervisi penganggaran**		**631.889.000**	***631.853.311***	**99,99%**
A	PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM	RM	338.641.000	*338.609.760*	**99,99%**
B	SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT	RM	293.248.000	*293.243.551*	**100,00%**
	Fungsi Urusan Daerah dan Hibah		**934.000.000**	***933.531.523***	
59	**Pengelolaan Urusan Daerah dan Hibah**		**934.000.000**	***933.531.523***	**99,95%**
A	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah		511.161.000	511.142.274	**100,00%**
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Daerah		353.333.000	352.980.597	**99,90%**
C	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah		55.982.000	55.929.255	**99,91%**
D	Penyelenggaraan WFH		13.524.000	13.479.397	**99,67%**
3159.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**		**3.908.000.000**	**3.906.416.063**	**99,96%**
51	**Penyusunan laporan kinerja organisasi**		**1.087.071.000**	**1.086.629.400**	**99,96%**
A	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN POM	RM/PNBP	69.210.000	69.210.000	**100,00%**
B	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama	RM/PNBP	8.017.000	8.017.000	**100,00%**
C	Penyusunan Laporan Tahunan Badan POM	RM/PNBP	151.608.000	151.323.000	**99,81%**
D	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja dan Monev Online	RM/PNBP	858.236.000	858.079.400	**99,98%**
52	**Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi**		**2.820.929.000**	**2.819.786.663**	**99,96%**

Kode	Uraian/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/ Akun/ Detil	RM/ PNP	Pagu	REALISASI KEUANGAN	
				Rupiah (Rp)	%
A	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis	RM/P NBP	527.862.000	527.662.401	**99,96%**
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	RM/P NBP	1.897.021.000	1.896.208.369	**99,96%**
C	Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2023	RM	394.547.000	394.417.393	**99,97%**
D	Penyelenggaraan WFH	RM	1.499.000	1.498.500	**99,97%**
3159.EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**		**4.675.500.000**	***4.675.123.312***	**99,99%**
51	**Pelaporan dan Administrasi Keuangan**		**3.940.140.000**	***3.939.809.516***	**99,99%**
A	Koordinasi Pengujian Tagihan Sekretariat Utama		437.446.000	437.417.867	**99,99%**
B	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran		590.531.000	590.379.322	**99,97%**
C	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran		157.958.000	157.923.975	**99,98%**
D	Penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara		267.896.000	267.816.045	**99,97%**
E	Sosialisasi Peraturan Bagi Bendahara		414.059.000	414.059.000	**100,00%**
F	Pelaksanaan BIMTEK Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Balai)		369.490.000	369.463.903	**99,99%**
G	Penyusunan Laporan Keuangan BPOM		1.667.059.000	1.667.058.301	**100,00%**
H	Penyelenggaraan WFH		35.701.000	35.691.103	**99,97%**
52	**Workshop Pengelolaan Keuangan**		**735.360.000**	***735.313.796***	**99,99%**
A	Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		177.886.000	177.885.100	**100,00%**
B	Workshop Pengelolaan PNBP		183.025.000	183.025.000	**100,00%**
D	FGD Laporan Keuangan Badan POM		368.464.000	368.418.696	**99,99%**
E	Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Anggaran		5.985.000	5.985.000	**100,00%**

2.5. SASARAN MUTU BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023

Sasaran Mutu merupakan target mutu yang ingin dicapai dalam sebuah instansi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan terdapat dalam

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama pada tanggal 22 Desember 2022. Kemudian pada awal tahun 2023 terdapat perubahan Struktur Organisasi dimana terdapat mutasi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ke unit kerja Inspektorat, karena itu posisi kepala biro menjadi kosong dan digantikan oleh Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga Perjanjian Kinerja 2023 direvisi dan ditetapkan kembali oleh Sekretaris Utama pada tanggal 5 Januari 2023. Pada bulan Juli, Kepala Biro baru ditetapkan setelah itu Perjanjian Kinerja revisi dan ditanda tangan kembali pada tanggal 2 Oktober 2023. Hasil ketetapan Perjanjian Kinerja terbaru seperti dibawah ini:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Mutu	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencaaan dan Keuangan	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	-
		2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,22
		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,57
		5	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,84
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER terhadap pedoman	81,39%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja,	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan	100%

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Mutu	Indikator Kinerja		Target
	pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM		pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	
		2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90
6	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84
7	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2,50
8	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)

2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023

Berikut pencapaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023:

Tabel 2. 6 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	-	-	-	exclude

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	di Lingkup Biro Perencaaan dan Keuangan	2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,22	61	82,19%	Cukup
		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96	89,8	93,54%	Cukup
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,57	96,61	101%	Sangat Baik
		5	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%	100%	120%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,84	3,54	92%	Cukup
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker	81,39 %	92%	113%	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
			Terhadap Pedoman				
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar terhadap pedoman	100%	100%	120%	Sangat Baik
		2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%	100%	100%	Baik
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1	Indeks Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan	90	90,9	101%	Sangat Baik
6	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Biro	84	87,39	104%	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
			Perencanaan dan Keuangan				
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2,5	2,75	110%	Sangat Baik
8	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100%	Baik

Keterangan:

Kategori Capaian Periode **Januari - Agustus 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
●	Tidak Memenuhi Ekspektasi (Capaian < 80%)
●	Belum Memenuhi Ekspektasi (80% <= Capaian < 100%)
●	Memenuhi Ekspektasi (100% <= Capaian < 120%)
●	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian=>120)

Kategori Capaian Periode **September - Desember 2023**

Warna	Keterangan
○	Belum Ada Capaian
●	Kurang (Capaian < 70%)
●	Cukup (70%>= Capaian < 100%)
●	Baik (Capaian = 100%)
●	Sangat Baik (100% > Capaian <= 120%)
●	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

LEMBAR SENGAJA KOSONG

BAB III
HASIL KEGIATAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646
Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
rorenkeu@pom.go.id
@birorenkeu.bpom

BAB 3:
HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2023

Pencapaian 8 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh keenam kelompok substansi yaitu Fungsi Perencanaan, Fungsi Penganggaran, Fungsi Urusan Daerah & Hibah, Fungsi Monitoring Evaluasi & Pelaporan Kinerja, Fungsi Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha atau juga kegiatan yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.

SASARAN KEGIATAN 1:
MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 1: NILAI RB BPOM PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 adalah:

A. BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 8-9 Februari 2023 di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring via zoom) dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta dihadiri oleh perwakilan dari 30 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kementerian Keuangan), Inspektorat I, Inspektorat II, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Organisasi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh unit kerja sampai level terkecil perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment. Selain itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga memaparkan pentingnya supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas laporan kinerja.

Gambar 3. 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022

Pada sesi berikutnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran memaparkan Nilai Kinerja Anggaran BPOM TA 2022 adalah 93,64 dengan capaian sasaran strategis yaitu 98,35 dan rata-rata NKA eselon I yaitu 88,94%. Selain itu Direktorat Jenderal Anggaran mengingatkan masih terdapat 5 satuan kerja yang belum mengisi menu laporan semester dan 24 satuan kerja belum mengisi menu laporan tahunan pada aplikasi SMART DJA. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM dengan melaporkan capaian RO sebelum tanggal 15 bulan berikutnya

pada tingkat satker, melaporkan capaian output program sebelum tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya dan capaian kinerja program sebelum tanggal 15 Januari tahun berikutnya pada tingkat eselon I, dan melaporkan capaian sasaran strategis sebelum tanggal 15 Januari tahun berikutnya pada tingkat K/L.

Pada sesi Biro Hukum dan Organisasi, disampaikan bahwa dengan jumlah responden sebanyak 6.669 responden, nilai Survei Kepuasan Masyarakat BPOM terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 90,83 di atas target nilai yang ditetapkan yaitu 89,45. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan BPOM tahun 2022 termasuk kategori A (Sangat Baik). Survei dilaksanakan oleh 88 Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM dengan rincian 15 Unit Pelayanan Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM, dan 39 Loka POM.

Narasumber Inspektur I dan II menjelaskan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP dari seluruh satker BPOM adalah 78,06, turun dari tahun 2021 dengan rata-rata 78,24. Untuk hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi BPOM masih menunggu hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tahun 2022. Selain itu pada tahun 2022, dari 20 unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM, hanya terdapat 1 unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK yaitu BBPOM di Makassar.

Selanjutnya, dalam paparan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, dipaparkan hasil survei mengenai pengetahuan masyarakat dengan hasil sebesar 67,91% masyarakat mengetahui bahwa BPOM adalah lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan. Selain itu, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui komoditi pengawasan BPOM, yaitu obat (85%); pangan olahan (81,63%); kosmetik (63,41%); obat tradisional (49,62%), suplemen kesehatan (48,57%), dan lainnya (0,93%). Sementara itu, sebesar 9,80% masyarakat masih tidak mengetahui komoditi pengawasan BPOM. Pengetahuan masyarakat tentang BPOM selama periode 2019 – 2022 cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan semakin dikenal oleh masyarakat, terutama setelah pandemi Covid-19. Sumber informasi tentang BPOM dan keamanan produk paling banyak diperoleh masyarakat dari televisi (79,53%), kemasan produk (49,35%), dan media sosial (32,21%). Sedangkan masyarakat yang memperoleh informasi melalui penyuluhan dan website BPOM masih sedikit yaitu 3,26% dan 1,64%.

Pada pemaparan Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman dan Bermutu Tahun 2022, disebutkan hasil pengukuran indeks tahun 2022 adalah 81,56% (Baik). Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (2019 – 2022) cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan bukan hanya pada indeks secara keseluruhan tetapi juga pada indeks dari masing-masing komoditi. Rata-rata nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat per provinsi masuk kategori baik, dengan nilai capaian yaitu pengetahuan 83,47%; sikap 84,59%; dan perilaku 76,63%.

Berdasarkan paparan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM tahun 2022 yang disampaikan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dijelaskan bahwa Indeks Kepuasan Nasional yaitu 76,39% (Baik) dengan target nasional 2022 yaitu 77% sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 99,20%. Adapun rata-rata nilai kepuasan masyarakat adalah Puas dengan indeks kepuasan per variabel sebagai berikut: upaya pengawasan 75,57%; tindakan 77,40%; pemberian informasi 76,11%; dan jaminan keamanan produk 76,46%. Tren kepuasan masyarakat (2019 – 2022) berdasarkan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2021 mengalami penurunan untuk semua komoditi tetapi mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar ±7 poin.

Pada paparan berikutnya dijelaskan juga hasil Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat nasional sebesar 94,80 (Sangat Puas). Rincian indeks per komoditi adalah: Indeks komoditi obat 93,20 (Sangat Puas), Indeks komoditi obat tradisional 94,90 (Sangat Puas), Indeks komoditi suplemen kesehatan 95,80 (Sangat Puas), Indeks komoditi kosmetik 95,20 (Sangat Puas), Indeks komoditi pangan olahan 94,90 (Sangat Puas). Indeks nasional maupun indeks per komoditi seluruhnya telah mencapai target pada tahun 2022. Indeks di unit penyelenggara KBP berkisar antara 87,7 – 98,6. Sebanyak 45 unit kerja (92%) telah mencapai target dan 4 unit kerja (8%) belum mencapai target.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memaparkan perlunya reformulasi IKPA TA 2022 untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja; pentingnya mendorong akselerasi belanja dan capaian output belanja; serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satker, eselon I, dan K/L. Adapun reformulasi ini mencakup tiga

aspek yaitu pada Kualitas Perencanaan (20%); Kualitas Pelaksanaan (55%); dan Kualitas Hasil (25%).

Narasumber Biro Hukum dan Organisasi menjelaskan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik UPP BPOM Pusat tahun 2022. Unit dengan nilai tertinggi adalah Biro Hukum dan Organisasi (4,90) dan unit dengan nilai terendah adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradsional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (4,06). Untuk Indeks Pelayanan Publik UPP Balai Besar/Balai POM tahun 2022, unit dengan nilai tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta (4,96) dan unit dengan nilai teendah adalah BPOM di Tarakan (3,94). Indeks UPP BPOM tahun 2022 yaitu 4,50 dari target 4,28.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan UPP tahun 2022 yaitu masih terdapat UPP yang menganggap penilaian internal kinerja UPP sebatas pemenuhan data dukung sehingga perlu peningkatan komitmen dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat serta proses penciptaan inovasi belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak inovasi namun minim kemanfaatan.

Paparan selanjutnya mengenai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan juga menunjukan bahwa indeks efektifitas KIE BPOM dengan nilai 93,60 termasuk kategori Sangat Efektif. Tren Indeks Efektivitas KIE Tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dengan nilai indeks 70,42 di tahun 2019; 91,56 di tahun 2020; 92,61 di tahun 2021 dan 93,60 di tahun 2022.

Dalam paparan selanjutnya mengenai pemanfaatan laporan tahunan UPT BPOM untuk evaluasi klasifikasi UPT BPOM dijelaskan bahwa ada dua unsur yang menjadi pembentuk klasifikasi UPT yaitu unsur pokok dengan bobot 80% dan unsur penunjang dengan bobot 20%. Narasumber mengingatkan pentingnya seluruh UPT agar menyediakan data kinerja melalui format laporan tahunan yang telah disediakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Paparan berikutnya dari narasumber Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memaparkan hasil evaluasi indikator Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman. Sampai dengan tahun 2022 sudah tercapai sekitar 51.692 sekolah, dengan jumlah kader yang terbentuk sebanyak 31.280 orang. Pada evaluasi program Desa Pangan Aman, dari total 51 desa stunting, 98,04% (50 desa) memiliki rencana aksi dan 1,96% (1 desa) tidak memiliki rencana aksi. Sedangkan dari total 206 desa non

stunting, 99,03% (204 desa) memiliki rencana aksi dan 0,97% (2 desa) tidak memiliki rencana aksi. Pada evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dari target 90 pasar seluruh pasar berhasil diintervensi.

Narasumber berikutnya dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjelaskan kapasitas laboratorium Badan POM diukur menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Pada tahun 2022 hasil penilaian SKL 2022 menunjukan 33 UPT mengalami peningkatan nilai SKL sedangkan 1 UPT mengalami penurunan nilai SKL. PPPOMN melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan ruang lingkup dan kompetensi melalui bimbingan teknis, penyelenggaraan uji profisiensi dan uji kolaborasi, dan memberikan rekomendasi peralatan laboratorium.

Narasumber Biro Sumber Daya Manusia menjelaskan hasil pengukuran IP ASN BPOM 2022 adalah 84,78. Selain itu narasumber mengingatkan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.300 fungsional PFM yang dikelola oleh PPSDM, sementara jabatan lain juga perlu dikelola dan diakomodir oleh PPSDM untuk ditanyakan kepada masing-masing instansi pengampu. Bagi yang belum menjalani diklat fungsional maka harus segera diusulkan melalui PPSDM.

Paparan oleh narasumber Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menjelaskan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja. Setiap komponen penilaian memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada aspek yang dinilai. Adapun nilai capaian dapat dipantau oleh masing-masing unit kerja pusat dan balai melalui aplikasi BOC, yaitu dengan login sebagai PIC Unit Teknis pada boc.pom.go.id, kemudian memilih menu Pengelolaan Data dan Informasi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan desk Hasil Kegiatan Pengawasan/RHPK, RAPK/RKP, E-Performance, dan draf Laporan Kinerja Tahun 2022. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf Laporan Kinerja masing-masing satuan kerja dan 334 orang SDM yang meningkat kompetensinya terkait SAKIP.

B. BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SAKIP DAN MONEV ONLINE TAHUN 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dasar dari penyelenggaran SAKIP di BPOM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari level satuan kerja, unit organisasi, sampai dengan level BPOM. Pada pertemuan ini dihadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, serta narasumber internal dari Biro Perencanaan dan Keuangan dan LPSE BPOM.

Gambar 3. 2 Kegiatan Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2023

Narasumber Bappenas menyampaikan bahwa pada tahun 2023 sedang disusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut akan dijelaskan tentang petunjuk pelaksaan evaluasi renstra oleh masing-masing K/L evaluasi RKP oleh Bappenas. Terkait aplikasi E-Monev Bappenas, sudah beberapa kali dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan supaya data anggaran dari aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan dapat mengalir *realtime* ke dalam aplikasi E-Monev Bappenas. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang terjadi sampai dengan akhir tahun misal terdapat *automatic adjustment*, kegiatan tidak berjalan dan lain sebagainya. Hal ini yang akan dievaluasi lebih lanjut. Verifikasi pelaporan dapat dilakukan paling lambat 14 hari kerja di bulan berikutnya. Setelah laporan diverifikasi, akan dilakukan pengolahan data untuk diproses tindak lanjut.

Narasumber Kementerian Keuangan menyampaikan 2 materi yaitu terkait aplikasi SAKTI Tahun 2022 dan aplikasi Monev SMART DJA. Terkait aplikasi SAKTI, disampaikan mengenai mekanisme pengisian dan pelaporan data capaian output pada aplikasi. Alur pelaporan dan konfirmasi capaian output adalah mengisi data capaian RO pada aplikasi SAKTI yang kemudian data tersebut dikirimkan kepada aplikasi OMSPAN di mana data RO tersebut dilakukan validasi. Setelah itu dilakukan konfirmasi status data, apabila ditolak maka perlu dilakukan perbaikan pengisian RO pada aplikasi SAKTI, sedangkan apabila diterima maka data RO masuk ke dalam database OMSPAN dan menjadi pembentuk nilai IKPA komponen Capaian Output. Penginputan pada aplikasi SAKTI dilakukan secara mandiri oleh operator PPK. Data yang telah dikirim dari aplikasi SAKTI akan masuk ke tabel perantara dan dapat dimonitor pada monsakti.kemenkeu.go.id modul komitmen sub menu "Monitoring Pengiriman Data Realisasi Kinerja Satker".

Materi terkait aplikasi Monev SMART DJA disampaikan oleh narasumber Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa pada tahun 2022, BPOM memperoleh Nilai EKA 93,64. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 92,82. Secara nasional, BPOM memperoleh peringkat 9 dari 46 K/L pada kategori pagu kecil pada tahun 2022 dengan NKA 94,84. Tiga Satker yang memperoleh nilai EKA tertinggi adalah Deputi II (94,62); Deputi I (94,30); dan Deputi 3 (92,22). Tiga Satker yang memperoleh nilai EKA terendah adalah Deputi IV (84,81), Loka POM di Aceh Tengah (85,05), dan Loka POM di Kabupaten Ende (85,06). Akses alamat website SMART berubah menjadi https://monev.kemenkeu.go.id/ dari sebelumnya http://smart.kemenkeu.go.id/.

Sebagai tindak lanjut pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev Online 2023, diperlukan komitmen dari seluruh Unit Kerja Pusat/Balai Besar/Balai POM/Loka POM untuk melaporkan data capaian Hasil Kegiatan Pengawasan (RHPK) melalui BOC, RAPK, aplikasi SMART DJA, E-Monev Bappenas, dan E-Performance secara tepat waktu setiap bulannya. Selain itu, agar seluruh Unit Kerja Pusat/Balai Besar/Balai POM/Loka POM juga tepat waktu dalam menyampaikan laporan baik laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja interim setiap triwulannya. Selanjutnya dalam melakukan penginputan data capaian, Unit Kerja Pusat/Balai Besar/Balai POM/Loka POM agar menyamakan data capaian antara laporan kinerja, aplikasi monev online dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada data yang diinput.

C. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) TAHUN 2023

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 28 – 30 Maret 2023 bertempat di Padma Resort Legian, Bali. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Badan POM dan diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Tema utama Rakernas Badan POM 2023 adalah "*tema Mendorong Daya Saing Industri Nasional melalui Pendampingan Regulatori dan Percepatan Pelayanan Dunia Usaha. "*.

Gambar 3. 3 Pembukaan dan pembahasan pada Rakernas BPOM Tahun

Tujuan penyelenggaraan Rakernas adalah untuk menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran 2023, dimana seluruh unit kerja berdiskusi untuk memberikan masukan terhadap Arah Kebijakan dan Program Prioritas BPOM 2023 serta Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Unit Eselon I dan II untuk mencapai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Selain itu, pada Rakernas dilakukan juga pembahasan terkait definisi operasional dan target Rincian Output UPT tahun 2024, sebagai bahan rancangan awal Renja yang akan dibahas pada pertemuan dengan Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Keuangan.

IKU 2: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN PENCAPAIAN KINERJA BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 2 adalah:

D. PENGEMBANGAN APLIKASI SIMETRIS RHPK

Aplikasi RHPK merupakan sistem pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) yang dilaporkan secara elektronik di lingkungan BPOM. Pelaporan RHPK dilakukan secara berkala per bulan. Sampai dengan tahun 2020, pelaporan RHPK dilakukan secara semi elektronik menggunakan *google drive*. Namun demikian, masih ditemukan kendala terkait pelaporan ini di mana data tidak akurat karena masih dimungkinkan terdapat kesalahan pada saat *input* data dan isu keamanan data.

Unit kerja pusat dan UPT melakukan pelaporan capaian kinerja dan anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya melalui aplikasi RHPK per bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sehingga kepala unit dapat melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran unit kerjanya masing-masing pada RHPK.

Pada tahun 2020, Biro Perencanaan dan Keuangan telah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka integrasi pelaporan capaian kinerja dan anggaran unit kerja melalui *Dashboard* BOC (https://simetris.pom.go.id/rhpk). Pada tahun 2023 dilakukan peningkatan kapabilitas aplikasi tersebut yang menjadi aplikasi RHPK.

Pelaporan melalui RHPK telah terintegrasi dengan aplikasi lain yang ada di BPOM antara lain dengan aplikasi SIPT dan e-BPOM. Untuk data yang tidak ditunjang oleh aplikasi yang ada di BPOM, maka pelaporan dilakukan secara manual pada format di RHPK.

Pada tahun 2023 pengembangan aplikasi RHPK dilakukan baik pada akun *user* maupun akun admin. Pada akun user telah dilakukan penambahan fitur Capaian RAPK UPT, integrasi dengan SIPT dan e-BPOM, penambahan form pengisian data yang sebelumnya dilakukan melalui *google drive* seperti data UMKM, PJAS Aman, Desa Aman, Pasar Aman, Capaian Indikator Balai/Balai Besar POM, Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dan Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar untuk *user* Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada akun admin telah dilakukan penambahan fitur Manajemen Data, Capaian RAPK UPT dan Monitoring.

a. Pengembangan pada Akun User

Penambahan Fitur Capaian RAPK UPT

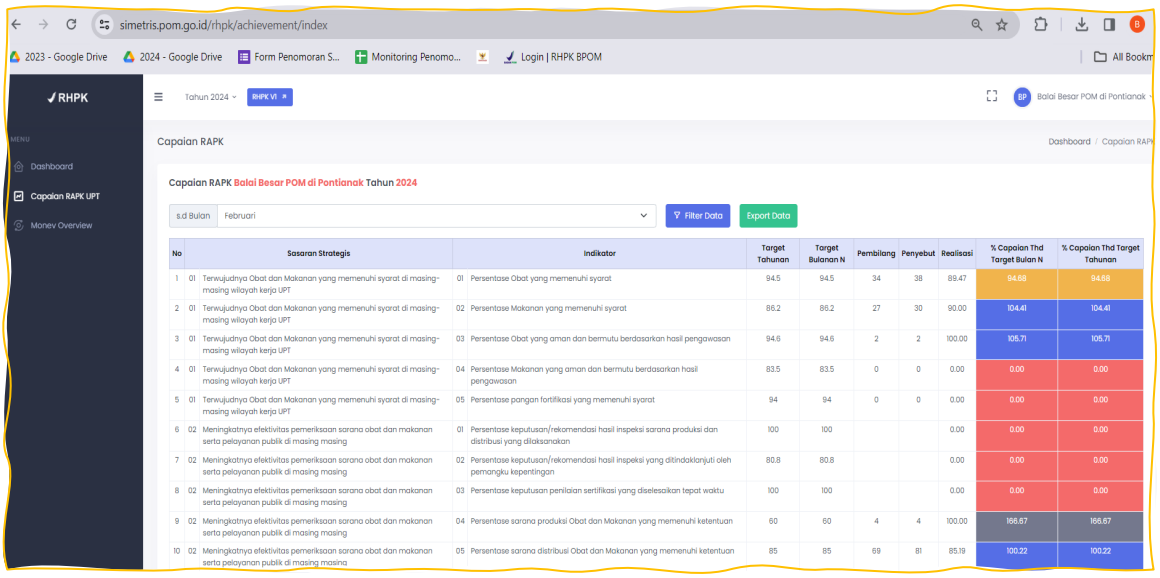

Gambar 3. 4 Tampilan Fitur Capaian RAPK UPT

Integrasi dengan SIPT dan e-BPOM

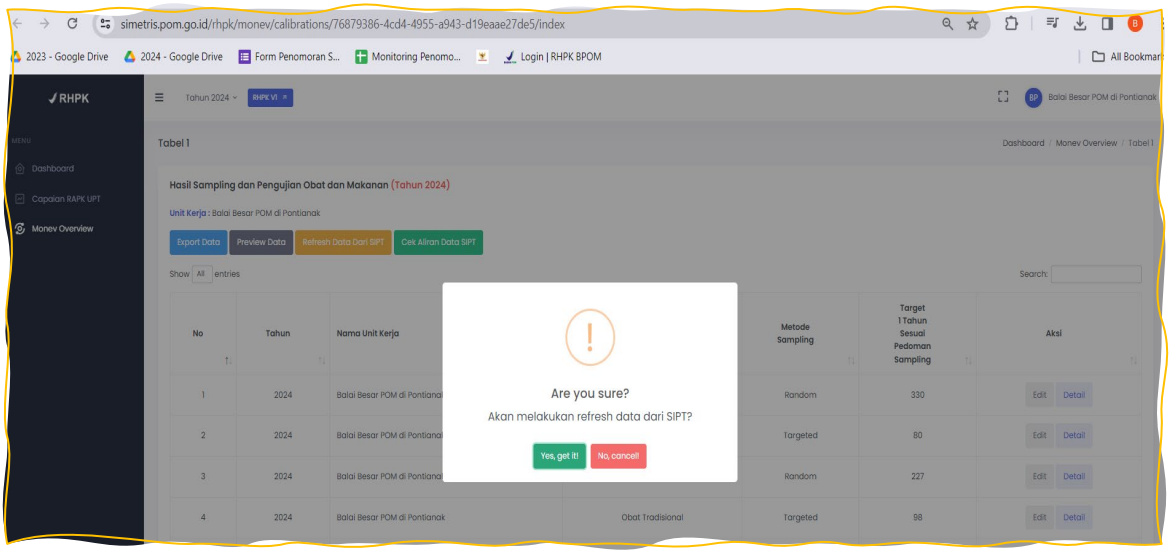

Gambar 3. 5 Tampilan Tabel Hasil Sampling dan Pengujian yang Sudah Terintegrasi dengan SIPT

Penambahan Form Pengisian Data yang Sebelumnya Dilakukan Melalui *Google Drive*.

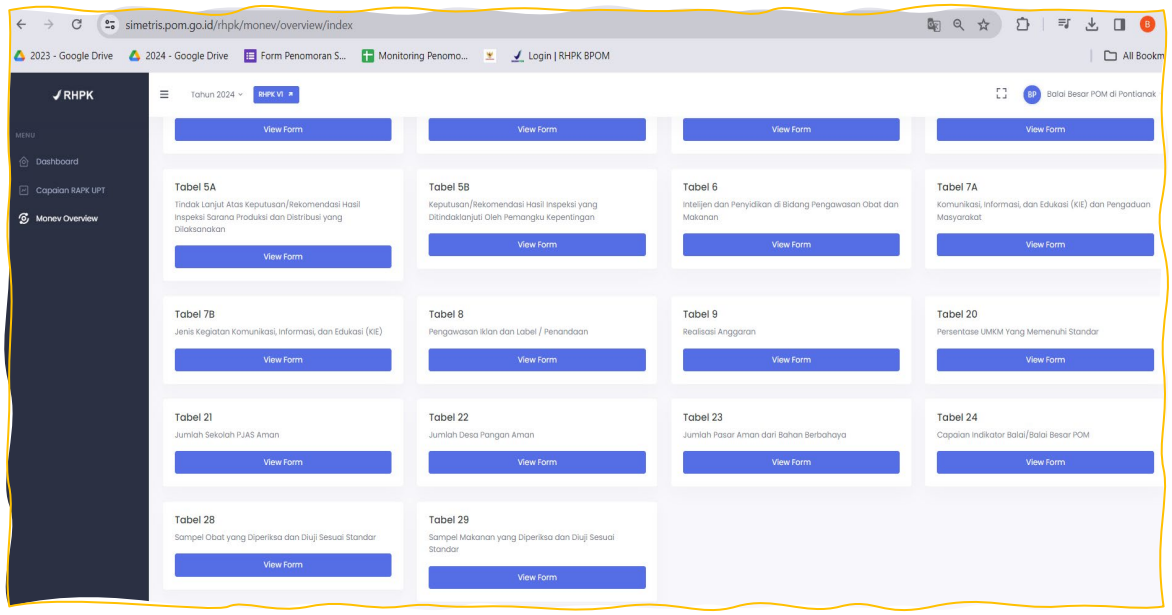

Gambar 3. 6 Tampilan Tabel Pada Aplikasi RHPK

b. Pengembangan pada Akun Admin

Penambahan Fitur Manajemen Data

Fitur manajemen data memiliki menu:

- ✓ **Data *user* (pengguna)**

Akun admin memiliki daftar data pengguna aplikasi RHPK BPOM.

- ✓ **Data Unit Kerja di BPOM**

Data unit kerja di BPOM terdiri dari data Kode Unit, Nama Unit Kerja, Alamat Unit Kerja, Lokasi Unit Kerja, titik *latitude* dan *longitude*, dan Wilayah Tugas. Akun admin memiliki fungsi untuk mengubah data-data tersebut.

- ✓ **Data *Form* Tabel**

Berisi daftar data *form* Monev baik untuk UPT maupun untuk Unit Kerja Pusat yang ada di aplikasi RHPK.

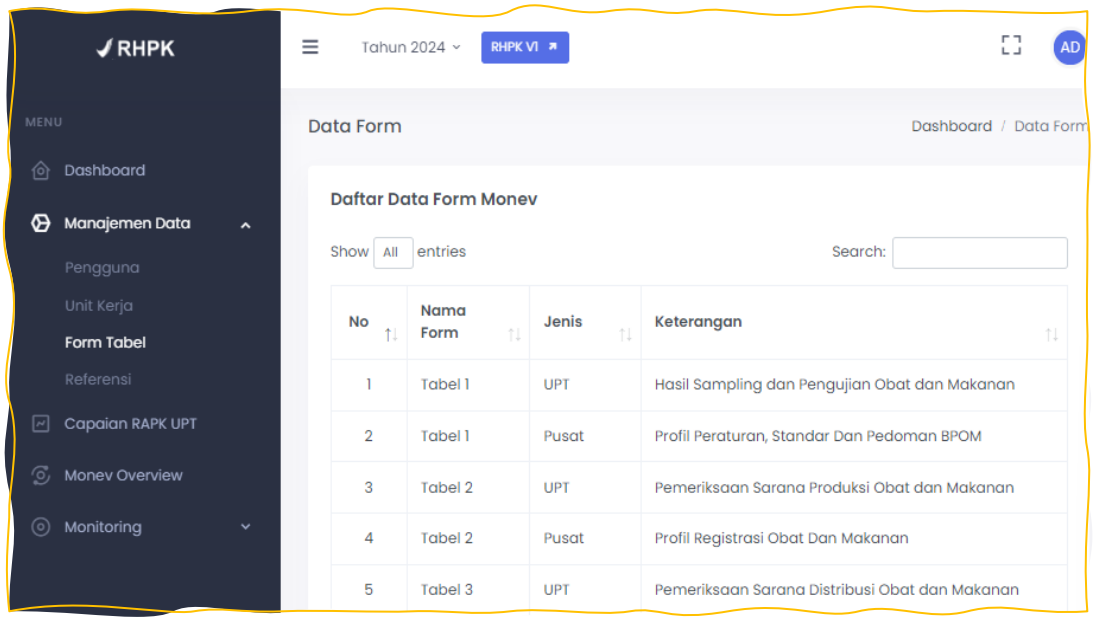

Gambar 3. 7 Tampilan Form Tabel Pada Menu Manajemen Data

c. Referensi

Berisi daftar data referensi yang dipakai sebagai sumber pada isian form monev, misal: nama anggota DPR, nama sarana produksi, dsb.

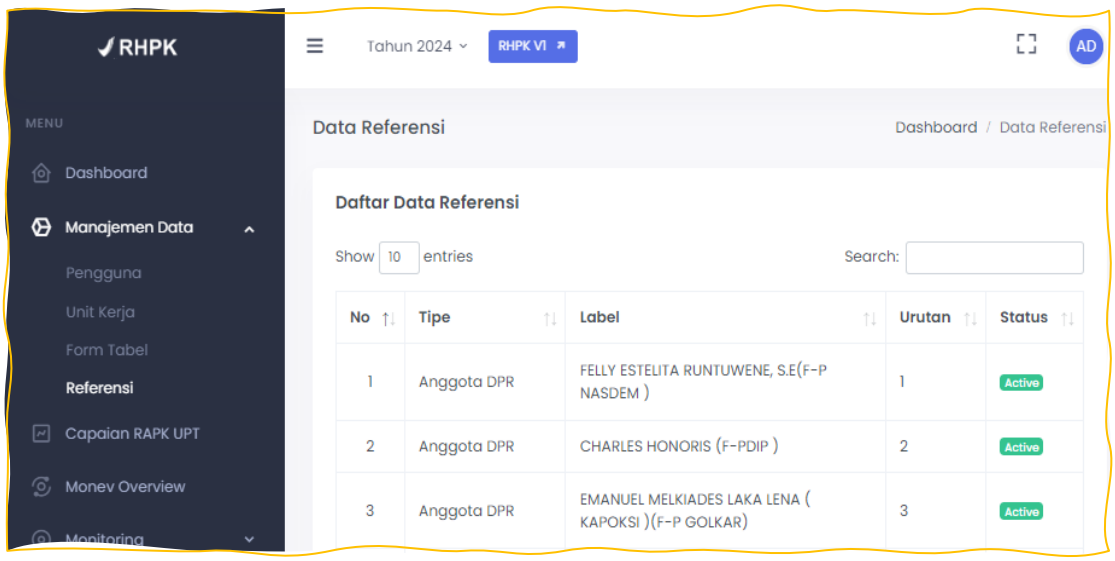

Gambar 3. 8 Tampilan Daftar Referensi Pada Menu Manajemen Data

Penambahan Fitur Capaian RAPK UPT

Menampilkan data Capaian RAPK UPT yang dapat dilakukan filter berdasarkan unit kerja dan bulan capaian. Pada fitur ini juga terdapat fungsi *download* excel melalui tombol *Export* Data.

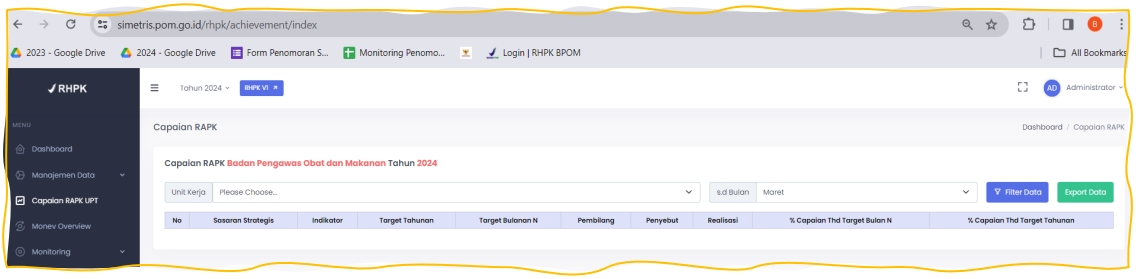

Gambar 3. 9 Tampilan Fitur Capaian RAPK UPT Pada Akun Admin

d. Penambahan Fitur Monitoring

Pada fitur monitoring terdapat 2 jenis, yaitu:

1) Unit Kerja

Pada monitoring unit kerja dapat melihat progres entri realisasi unit kerja pada tahun berjalan.

2) Aliran Data API

Pada monitoring aliran data API dapat melihat data yang sudah dialirkan dari Satu Data BPOM melalui API. Data yang sudah dialirkan melalui Satu Data BPOM yaitu data dari aplikasi SIPT (Pengujian dan Pemeriksaan), aplikasi e-BPOM dan aplikasi SMARTPOM.

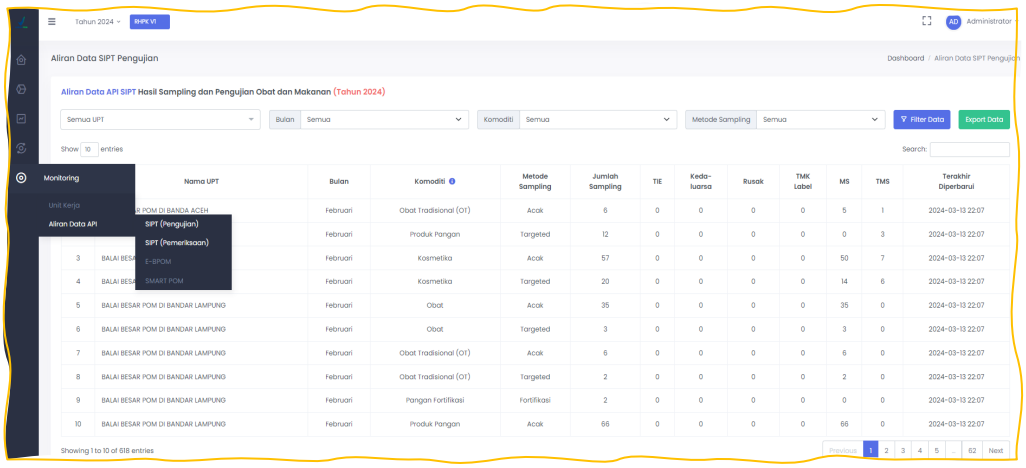

Gambar 3. 10 Tampilan Monitoring Aliran Data API

Rencana pengembangan aplikasi RHPK tahun 2024 akan terintegrasi dengan aplikasi monev Pusakom, aplikasi monev Kerja Sama BPOM, aplikasi Kedeputian Bidang Penindakan dan aplikasi SIPT menu pengawasan iklan. Dalam pelaksanaan integrasi tersebut akan berkoordinasi dengan Pusdatin BPOM.

E. PENGEMBANGAN APLIKASI *E-PLANNING* SIMETRIS

Aplikasi SIMETRIS atau Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi adalah aplikasi berbasis Web Base yang dapat diakses dari berbagai lokasi melalui jaringan internet. e-Planning SIMETRIS merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem *bottom-up planning* dan *top down policy* yang efektif dan efisien berbasiskan Teknologi Informasi sebagai bagian dari pelaksanaan *e-Government.* Pada prinsipnya pembanguan Aplikasi e-planning SIMETRIS untuk mempermudah proses Perencanaan Strategis dan Tahunan di BPOM.

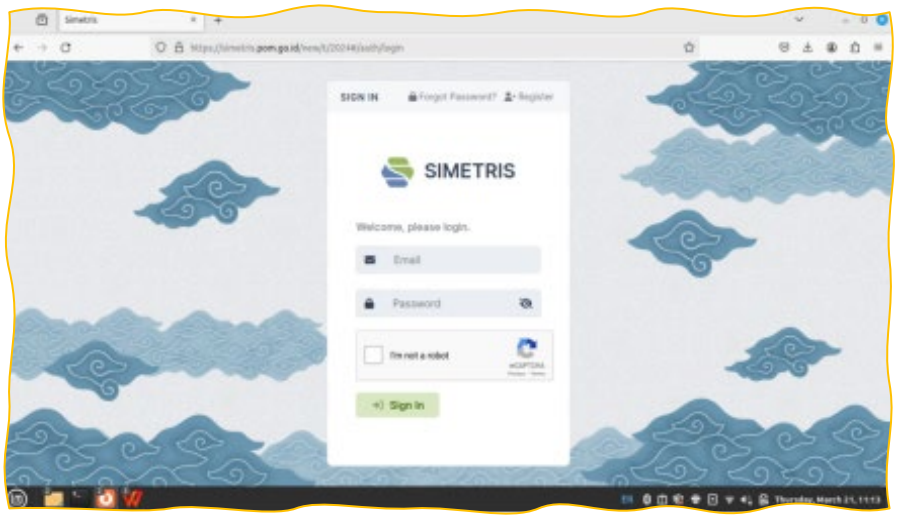

Gambar 3. 11 Tampilan login SIMETRIS setelah pengembangan

Pengembangan Aplikasi SIMETRIS tahun 2023 difokuskan pada penyempurnaan aplikasi sebelumnya dan integrasi data dengan aplikasi KRISNA yang merupakan aplikasi Supra Sistem dari Kementrian PPN/Bappenas sehingga penyusunan rancangan kerja awal Renja dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pengembangan Aplikasi SIMETRIS ini meliputi perbaikan dan pengembangan beberapa fungsi seperti pengaturan User, Renja K/L, Manual IKU, Manual RO, integrasi dengan aplikasi KRISNA, Penyusunan PK/RAPK, dan Matriks Data Anggaran. Pada pengaturan user yang baru di SIMETRIS, hak akses user diatur olehb admin untuk mempermudah user dalam melakukan penginputan Renja K/L dan penyusunan PK/RAPK. User juga dimudahkan dalam penyusunan Sasaran Stategis dan Program Kegiatan karena data sudah ditarik dari aplikasi KRISNA. Pada penyusunan Manual IKU dan Manual RO di Simetris yang dikembangkan, user diberikan keleluasaan pada saat penginputan dengan dapat dilakukan penginputan gambar untuk rumus dan tabel di Definisi Operasional dan Cara Perhitungan. Di Aplikasi Simetris yang dikembangkan juga memberikan keleluasaan

user dalam menginputkan nama pejabat, jabatan, lokasi penandatanganan dan penanggalan pada saat mencetak dokumen PK dan RAPK.

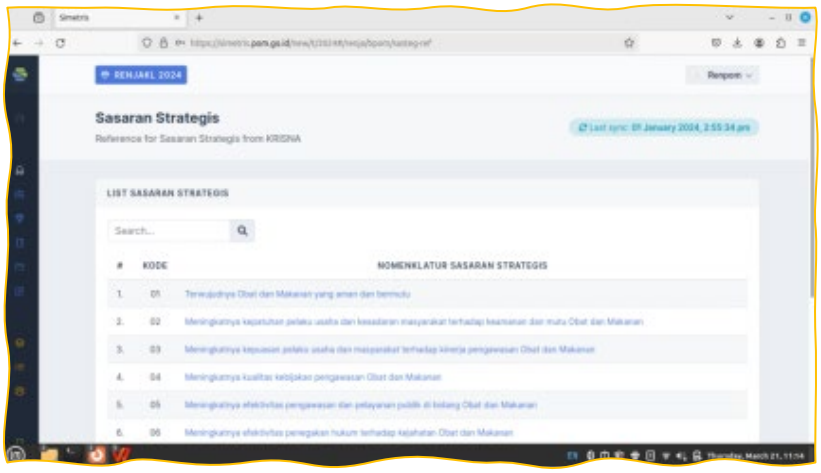

Gambar 3. 12 Sasaran Strategis yang ditarik dari aplikasi KRISNA

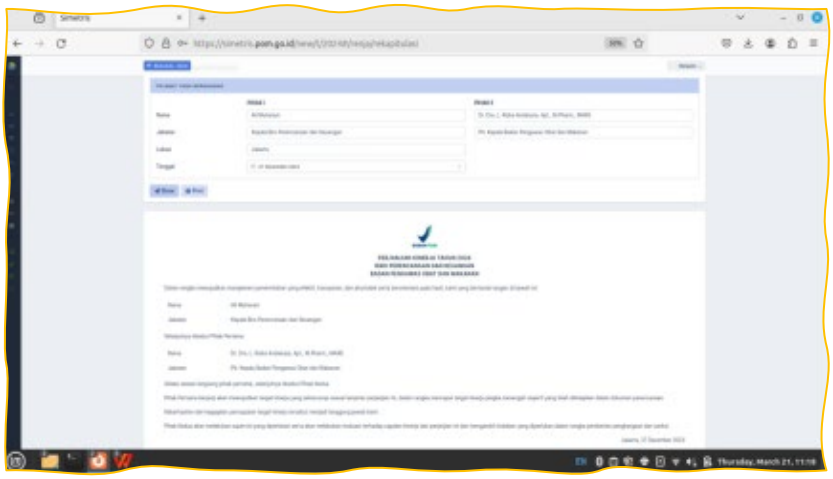

Gambar 3. 13 Menu cetak dokumen PK

Pada tahun 2023 ini pengembangan e-Planning SIMETRIS telah lolos *System Integration Testing* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT) sehingga dapat dimasuk ke dalam serve SIMETRIS yang sudah ada di Pusat Data Nasional (PDN) untuk dilakukan Publikasi dan dimanfaatkan oleh user.

F. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan; menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program; serta memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Sampai saat ini, pelaksanaan monev di BPOM telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dengan beberapa tabel yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pelaporan kinerja dari unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM diatur berdasarkan Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 192 Tahun 2022. Monev unit kerja di Pusat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap triwulan bersama penanggung jawab data dari unit kerja untuk menyampaikan capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi.

Hasil dari pertemuan ini disusun menjadi Laporan Kinerja dalam Angka Triwulanan dan Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Fisik, Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Beserta Rencana Tindak Lanjut Per Triwulan.

Gambar 3. 15 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan

IKU 3: NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 3 adalah:

G. MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/ BALAI POM

Sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan berkepentingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi dari pusat terhadap program yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh petugas pusat merupakan proses pembelajaran bagi Balai Besar/ Balai POM untuk selanjutnya dapat melakukan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan supervisi secara regional dengan rincian UPT di tiap regional sebagai berikut:

Tabel 3. 1
DAFTAR PESERTA MONEV DAN SUPERVISI REGIONAL

Kegiatan	Lokasi	UPT Peserta	Tanggal
Regional 1	Balai Besar POM di Banjarmasin	Balai Besar POM di Bandar Lampung Loka POM di Kabupaten Tulangbawang Balai POM di Batam Loka POM di Kota Tanjungpinang Balai POM di Pangkalpinang Loka POM di Kabupaten Belitung Balai Besar POM di Palembang Loka POM di Kota Lubuklinggau Balai POM di Bengkulu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Balai POM di Jambi Balai Besar POM di Mataram	12 – 15 Juni 2023
Regional 2	Balai Besar POM di Padang	Balai Besar POM di Banjarmasin Loka POM di Kabupaten Hulu SungaiUtara Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Balai Besar POM di Denpasar Loka POM di Kabupaten Buleleng Balai Besar POM di Palangkaraya Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Balai Besar POM di Pontianak Loka POM di Kabupaten Sanggau Balai Besar POM di Samarinda Balai POM di Tarakan	26 – 29 Juli 2023

Kegiatan	Lokasi	UPT Peserta	Tanggal
Regional 3	Balai Besar POM di Denpasar	Balai Besar POM di Medan Balai Besar POM di Manado Balai Besar POM di Pekanbaru Balai Besar POM di Yogyakarta Balai POM di Manokwari Balai POM di Kupang Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Loka POM di Kabupaten Toba Samosir Loka POM di Kota Dumai Loka POM di Kota Payakumbuh Loka POM di Kota Sungai Penuh	9 – 10 Agus 2023
Regional 4	Balai Besar POM di Makassar	Balai POM di Ambon Balai POM di Sofifi Loka POM di Kabupaten Mimika Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Loka POM di Kabupaten Bima Loka POM di Kabupaten kepulauan Tanimbar Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Loka POM di Kabupaten Merauke Loka POM di Kota Sorong Loka POM di Kabupaten Ende Loka POM di Kota Palopo	23 – 24 Agus 2023
Regional 5	Balai Besar POM di Surabaya	Balai Besar POM di Jayapura Balai Besar POM di Makassar Balai POM di Gorontalo Balai POM di Kendari Balai POM di Mamuju Balai POM di Palu Loka POM di Kabupaten Banggai Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Loka POM di Kota Balikpapan Loka POM di Kota Baubau Loka POM di Kota Tanjungbalai Loka POM di Kota Surakarta	7 – 8 Sept 2023
Regional 6	Balai Besar POM di Medan	Balai Besar POM di Banda Aceh Balai Besar POM di Bandung Balai Besar POM di Jakarta Balai Besar POM di Serang Balai Besar POM di Surabaya Loka POM di Kabupaten Banyumas Loka POM di Kabupaten Bogor Loka POM di Kabupaten Jember Loka POM di Kabupaten Kediri Loka POM di Kabupaten Tangerang Loka POM di Kota Tasikmalaya Loka POM di Kota Tanjungbalai	11 – 14 Okt 2023

Dalam setiap pelaksanaan monev secara regional, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah paparan capaian anggaran dan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan; diskusi terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beserta rencana tindak lanjut; kemudian evaluasi entri data capaian kinerja dan anggaran UPT baik pada

aplikasi monev *online* (Bappenas, BOC dan E-Performance) maupun pelaporan manual (RHPK dan RAPK). Dengan adanya kegiatan monitong dan supervisi ini diperoleh pola pencapaian keberhasilan suatu kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh UPT BPOM serta mempermudah deteksi dan identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin sehinga alternatif untuk penyelesaian masalah penyebab terhambatnya pencapaian indikator dapat segera ditemukan.

(A)

(D)

(B)

(E)

(C)

(F)

Gambar 3. 16 Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Regional: (A) Regional 1, (B) Regional 2, (C) Regional 3, (D) Regional 4, (E) Regional 5 dan (F) Regional 6

H. BIMTEK PENYUSUNAN PK DAN RAPK UNIT ORGANISASI/SATKER MELALUI APLIKASI *E-PLANNING* SIMETRIS

Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi. Selanjutnya Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan sosialisasi Penyusunan PK 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023 bersama seluruh Satuan Kerja dilingkup Badan POM secara hibrid. Pelaksanaan Bimtek diawali dengan paparan terkait mekanisme penyusunan PK dan RAPK melalui aplikasi SIMETRIS yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengisian aplikasi kepada unit kerja oleh tim perencanaan.

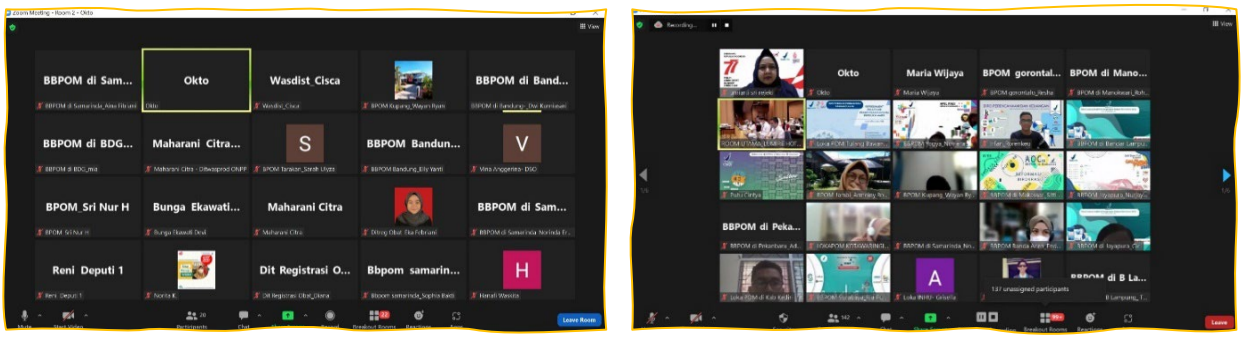

Gambar 3. 17 Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi e-planning SIMETRIS (Daring)

I. KEGIATAN FORUM DISKUSI JFP (PERENCANA) UNTUK MENDUKUNG KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, soliditas, serta profesionalitas JFP di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah dilaksanakan Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM Pada tanggal 24-25 Mei 2023. Kegiatan Forum Diskusi JFP mengusung tema "Peningkatan *Awareness* Peran Perencana dalam Mendukung Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan", yang diikuti oleh 66 Perencana dan Calon Perencana, baik dari Unit Pusat maupun UPT BPOM. Hasil yang diharapkan dari Forum ini adalah peserta mampu melaksanakan peran dan tugas sebagai perencana sesuai dengan pedoman dan memberikan kontribusi aktif dalam peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pertemuan di buka dengan sambutan oleh Ketua Tim Kerja Koordinator Perencanaan BPOM. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Narasumber dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklantren) – Bappenas dan Konsultan Cognoscenti Consulting Group dengan materi: Peta Strategis dalam Perencanaan Strategis Organisasi.

Gambar 3. 19 Peserta Perencana dalam Forum Diskusi JFP mengusung tema "Peningkatan Awareness Peran Perencana dalam Mendukung Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan"

Gambar 3. 20 Fordis JFP "Penguatan Peran Perencana dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektifitas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan"

Dalam kegiatan Forum Diskusi juga membahas peran dan tugas perencana, serta beban kerja JFP yang sangat banyak dan beragam sehingga menyebabkan JFP tidak dapat fokus pada tugas perencanaan. Serta melakukan analisis SWOT dalam rangka mempersiapkan Renstra 2025-2029. Biro Perencanaan dan

Keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, diantaranya yaitu menyusun Pedoman Teknis Kinerja JFP sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja JFP, menyusun analisis beban kerja (ABK) pegawai JFP dan menyusun rencana peningkatan kompetensi bersama PPSDM.

J. FORDIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) BPOM: PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) K/L 2020-2024. Dalam rangka persiapan penyusunan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) BPOM, telah dilaksanakan Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM pada tanggal 15-17 November 2023. Forum Diskusi JFP mengusung tema "Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra), diikuti sebanyak 62 orang Perencana dan Calon Perencana baik dari Unit Pusat maupun UPT BPOM. Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah peserta mampu melaksanakan peran dan tugasnya terkait isu strategis, rancangan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan menjadi inputan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra BPOM 2025-2029 dan Peta Strategis UPT.

Gambar 3. 21 Peserta Fodis Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM : Persiapan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra)

Gambar 3. 22 Kepala Biro Memimpin Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM

Pertemuan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Bapak kepala Biro perencanaan dan Keuangan BPOM. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Narasumber dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kemeterian PPN/Bappenas, Direktorat Alokasi Pendanaan dan Pembangunan –

Kementerian PPN/Bappenas dan Narasumber dan *Personal Quality Trainer* dari Loop Institute dengan tema: *Agile & Adaptive* Penguatan Peran Perencana.

Dalam Forum Diskusi ini juga membahas beban pekerjaan JFP yang mencakup bidang Perencanaan, Penganggaran, sampai monitoring evaluasi secara menyeluruh. Di UPT pekerjaan JFP sangat teknis sehingga banyak pekerjaan Analis Anggaran yang dilakukan oleh JFP. Sehingga diharapkan pekerjaan dua bidang ini dikerjakan oleh JFP, sehingga mengurangi risiko duplikasi pekerjaan. Biro Perencanaan dan Keungan melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, diantaranya yaitu menyusun Pedoman Teknis Kinerja JFP sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja JFP dan menyusun analisis beban kerja (ABK).

IKU 4: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

K. SOSIALISASI PERATURAN BAGI BENDAHARA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Maret 2023 secara luring bertempat di Harris Hotel and Convention Bekasi, Jawa Barat. Namun untuk memfasilitasi beberapa bendahara yang memang tidak dapat hadir di antaranya karena sedang diaudit BPK maka kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring. Dalam pertemuan ini akan dihadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksana Anggaran, Direktorat P2Humas Ditjen Pajak RI, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan, serta APIP BPOM. Rangkaian kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan adanya pre-test, paparan materi dari narasumber, diskusi dan diakhiri dengan post-test. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bagi Bendahara diikuti oleh Bendahara Pengeluaran satker dan Bendahara Pengeluaran Pembantu satker Sekretariat Utama BPOM, terdiri dari:

- 10 orang Bendahara Pengeluaran Satker Pusat;
- 33 orang Bendahara Pengeluaran Satker Balai Besar/Balai POM;
- 38 orang Bendahara Pengeluaran Satker Loka;
- 6 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Sekretariat Utama.

Terdapat 2 (dua) satker yang tidak dapat mengirimkan peserta luring yaitu Balai Besar POM Denpasar dan Loka Buleleng dikarenakan sedang diaudit oleh BPK.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bendahara atas berbagai peraturan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan bendahara hingga terjadi sharing pengalaman antar bendahara satker di lingkungan BPOM sehingga dapat memitigasi serta mengantisipasi risiko dalam pengelolaan keuangan oleh bendahara.

Untuk mempertegas Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dimana masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran diberi amanat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas APBN secara berkala dan menyeluruh sesuai periode dan aktivitasnya. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dengan melihat sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Mengingat nilai kinerja level instansi merupakan agregat dari nilai kinerja satker-satkernya, maka untuk memastikan nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPOM berada pada rentang sangat baik, harus dipastikan pelaksanaan level satker juga bernilai kinerja sangat baik.

Pembinaan pelaksanaan anggaran merupakan intervensi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pembina pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan BPOM bersama dengan tim dari direktorat teknis di kementerian keuangan seperti Direktorat Pelaksana Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, maupun Direktorat PNBP yang akan dilibatkan sebagai narasumber maupun dalam penyusunan materi pembinaan.

Untuk tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 22 satker yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

Merupakan satker baru yang memerlukan pengawalan secara intensif terkait pemahaman terhadap penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, norma-norma waktu sesuai regulasi, tugas fungsi dan kewenangan pejabat perbendaharaan satker.

Merupakan satker dengan nilai IKPA rendah pada tahun sebelumnya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berjalan.

Merupakan satker dengan nilai IKPA rendah berdasarkan hasil penilaian triwulan berjalan di TW 1 dan 2 TA 2022, untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat meningkat kinerjanya pada TW 3 dan TW 4 tahun berjalan.

L. WORKSHOP IKPA DAN INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT

Dalam rangka mewujudkan belanja negara yang berkualitas sesuai dengan tatakelola yang baik dan akuntabel, perlu dilakukan penilaian atas pelaksanaan belanja Kementerian dan Lembaga menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Realisasi anggaran Badan POM tahun 2022 adalah sebesar 99,34%. Namun ternyata penilaian IKPA bukan hanya dinilai dari penyerapan anggaran saja, akan tetapi masih ada indikator-indikator lainnya yang menjadi dasar penilaian. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara dan Lembaga, penilaian kinerja didasarkan pada 8 (delapan) indikator penting yang merupakan bagian dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1) Kualitas Perencanaan (terdiri dari indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA);
2) Kualitas Pelaksanaan (terdiri dari indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM); dan
3) Kualitas Hasil (terdiri dari indikator Capaian Output).

Berdasarkan data OMSPAN (dicetak tanggal 17 Januari 2023) nilai IKPA BPOM adalah 96,63 atau masuk dalam kategori sangat baik. Bahkan, beberapa waktu lalu 2, (dua) satker di lingkungan BPOM pusat meraih penghargaan dari KPPN Jakarta VI, penghargaan yang diraih antara lain:

Satker Sekretariat Utama Badan POM meraih penghargaan sebagai Peraih Nilai IKPA Terbaik Pertama Tahun 2022 Kategori Pagu Besar.

Satker DEPUTI II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik mendapatkan penghargaan sebagai Peraih Nilai IKPA Terbaik Pertama Tahun 2022 Kategori Pagu Sedang.

Meskipun nilai IKPA BPOM masuk kategori sangat baik, jika diteliti lebih dalam masih banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan BPOM. Indikator dengan nilai IKPA yang belum optimal adalah Deviasi Halaman III DIPA yang hanya mencapai nilai 88,32 (cukup). Hal ini juga yang mempengaruhi aspek kualitas perencanaan anggaran mendapatkan nilai terendah (94,16) dibandingkan aspek kualitas pelaksanaan anggaran (96,84) dan kualitas hasil (99,78). Diharapkan seluruh satker yang ada di lingkungan Badan POM dapat terus berusaha untuk mendapatkan nilai IKPA terbaik di setiap tahunnya. *Sharing* pengalaman dan strategi dari satker yang telah berkinerja baik dapat dilakukan. Melalui forum Workshop Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran hari ini kami sangat berharap masukan dari Bapak Kepala KPPN dan tim narasumber terkait langkah konkrit dan strategis apa yang perlu diimplementasikan BPOM agar lebih baik dan terencana dalam pelaksanaan anggaran TA 2023.

Gambar 3. 23 Workshop Ikpa dan Indikator Capaian Output

IKU 5: PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISUSUN DENGAN SAP

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 5 adalah:

M. PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTASI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT DAN BALAI)

Gambar 3. 24 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan 2023

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada petugas pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di Badan POM yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan meliputi:

1) Memberikan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2) Memberikan pengayaan kepada Satuan Kerja tentang teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang sesyau dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3) Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

a. Memberikan kesamaan persepsi serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di badan POM yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan.
b. Tertibnya pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di Badan POM sebgai wujud pertanggungjawaban yang tertib, dan taat pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

c. Merupakan kegiatan prioritas yang mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai standar PSAP.

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

a. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa materi-materi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
b. Melakukan Analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja yang dibina.
c. Menelusuri kebenaran dokumen sumber yang telah diinput.
d. Memastikan bahwa rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan dengan benar.

Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) orang petugas pusat ke Satuan Kerja di seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan di 19 (Sembilan belas) Satuan Kerja.

N. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022 Unaudited berlangsung mulai dari tanggal 30 Januari s.d. 3 Februari 2023, bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta. Kegiatan ini dihadari oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Petugas BMN/persediaan Tingkat Satker. Dalam pertemuan ini akan dibahas Laporan Keuangan 83 Satker untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM, melalui proses:

a. Verifikasi dan analisa hasil rekonsiliasi internal dan eksternal seluruh satker melalui aplikasi MONSAKTI.
b. Klarifikasi dan konfirmasi peristiwa/kejadian penting yang telah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Satker.
c. Identifikasi informasi penting lainnya dari CaLK Satker yang perlu dielaborasi dan diungkap dalam CaLK BPOM.

Gambar 3. 25 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022 *Unaudited*

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2023 diselengggarakan pada tanggal 18 - 21 Juli 2023. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Pusat melaksanakan secara luring di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Daerah bergabung melalui zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam pertemuan ini dibahas Laporan Keuangan 83 Satker untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.

Gambar 3. 26 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2023

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III Tahun Anggaran 2023 diselengggarakan pada tanggal 18 - 20 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Pusat

melaksanakan secara luring di Hotel Avenzel Cibubur dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Daerah dan Satwil bergabung melalui zoom meeting. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan kali ini merupakan pertama kalinya Laporan keuangan wilayah disusun sebagai kewajiban implementasi Keputusan Kepala BPOM Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penunjukan Satuan Wilayah Kerja sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang Wilayah (UAPPBW) yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Dalam pertemuan ini dibahas 18 Laporan Keuangan Wilayah dan Laporan Keuangan 83 Satker untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.

Gambar 3. 27 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III TA 2023

O. PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN PNBP BADAN POM

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti Penerimaan Negara pada umumnya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak juga membutuhkan sebuah sistem pencatatan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaanya. Pencatatan terhadap transaksi penerimaan sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh

dua pihak, yaitu oleh pihak Instansi Pemerintah pemungut PNBP dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib setor dalam melakukan pembayaran ke kas negara atas semua jenis setoran, pemerintah telah menyiapkan modul penerimaan negara (MPN) yang menggantikan sistem penerimaan yang lama (SISPEN, MP3 ,dan EDI). MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan negara dan Anggaran Negara. Dengan diimplementasikannya MPN ini diharapkan:

- ✓ Peningkatan validitas nilai penerimaan negara.
- ✓ Peningkatan akuntabilitas penerimaan negara.

Salah satu bagian dari sistem MPN adalah Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar untuk membayar PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan terkait penatausahaan PNBP, DJPB telah membangun Aplikasi SPAN. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan.

SPAN digunakan untuk mendukung pengelolaan Keuangan Negara dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Oleh karena itu, untuk mendukung data SPAN dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, pengembangan Sistem Aplikasi PNBP Satker menjadi begitu penting. Untuk itu, Badan POM telah membangun Sistem Penerimaan PNBP Fungsional Badan POM yang telah terintegrasi dengan SIMPONI dan SPAN dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNBP Fungsional Badan POM.

SASARAN KEGIATAN 2:
MENINGKATNYA KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 6: INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 6 adalah:

A. SURVEI KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
c. penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM
d. penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan
e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Salah satu Sasaran Kegiatan di Biro Perencanaan sesuai dengan Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024 yaitu Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan

manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan. Oleh karena itu pada tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pada Januari tahun 2023 telah terbit laporan hasil survey evaluasi Kepuasan Pelayanan Internal di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022. Layanan yang dimaksud merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Unit Biro Perencanaan dan Keuangan ini diperoleh dari rata-rata jumlah nilai indeks dari enam Substansi. Layanan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2022.

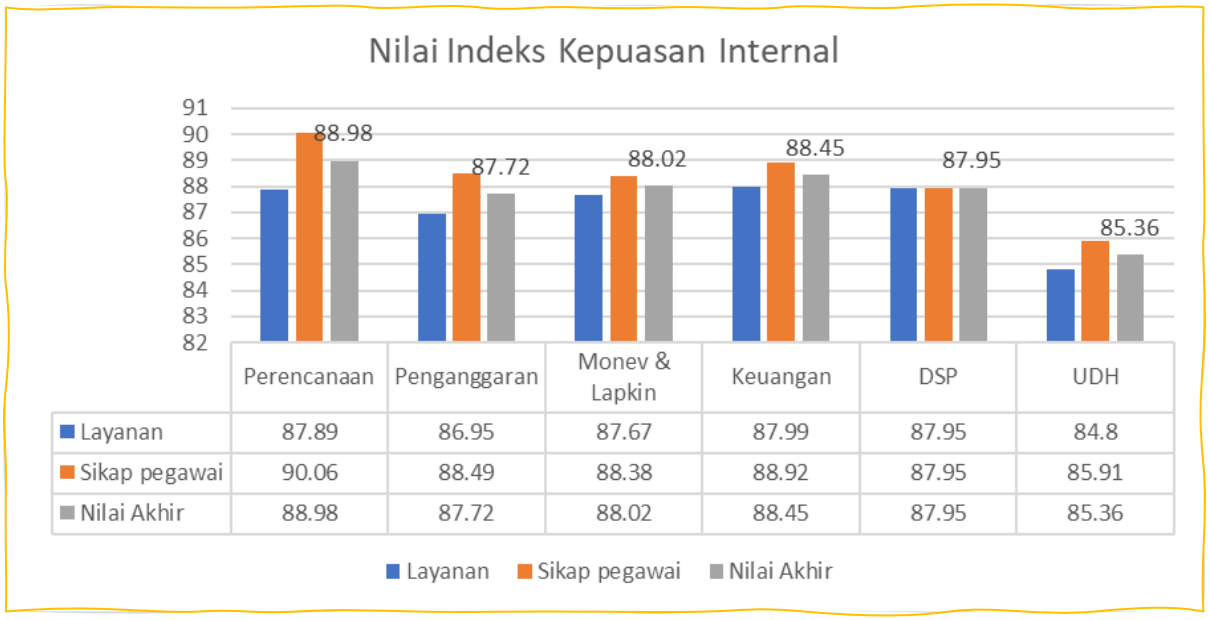

Gambar 3. 28 Nilai Indeks Kepuasan Setiap Fungsi di Rorenkeu

A. Tabel Indeks berdasarkan tanggapan pada "Layanan yang diselenggarakan" Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	87,89
2	Penganggaran	86,95
3	Monev & Lapkin	87,67
4	Keuangan	87,99
5	DSP	87,95
6	UDH	84,80

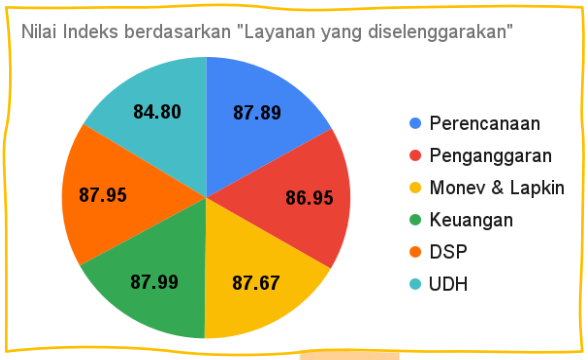

B. Tabel Indeks berdasarkan tanggapan pada "Layanan yang diberikan pegawai" di Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	90,06
2	Penganggaran	88,49
3	Monev & Lapkin	88,38
4	Keuangan	88,92
5	DSP	87,95
6	UDH	85,91

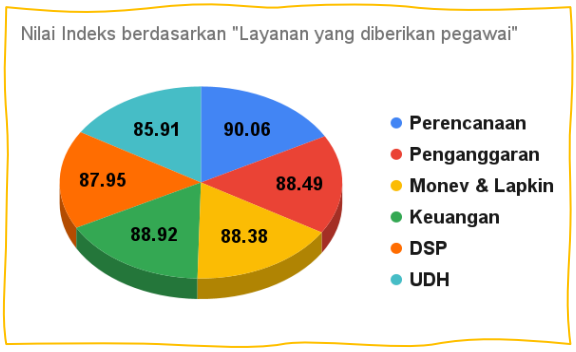

C. Nilai Indeks Akhir Layanan Kepuasan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan 2022.

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	88,98
2	Penganggaran	87,72
3	Monev & Lapkin	88,02
4	Keuangan	88,45
5	DSP	87,95
6	UDH	85,36
Nilai Indeks Unit		**88,22**

Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **88,22** (Delapan puluh delapan koma dua puluh dua) dalam hal ini masuk dalam kategori **SANGAT BAIK.**

B. SURVEI INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) ANGKA YANG MENUNJUKKAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi

penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan Survei IPP/IPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Adapun hasil survei IPP dan IPAK Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dimonitor melalui aplikasi SAPA APIP dengan domain https://sapaapip.pom.go.id/admin/login. Pada bulan Desember 2023 terdapat total 28 responden dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan pada Bab II huruf A bahwa jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei yang akan dihitung. Pada survei IPP terdapat 8

dari 14 pertanyaan yang mewakili unsur pelayanan terdapat pada U2, U4, U5 dan U10 – U14 dan pada survei IPAK terdapat 5 pertanyaan yaitu pada P1 - P5. Adapun hasil analisis dari kedua survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Hasil Analisis IPP dan IPAK Desember 2023

	IPP								IPAK				
Index	3.63								3.83				
Nilai	5.45								4.79				
Index Per Unsur	3.48	3.60	3.62	3.71	3.57	3.67	3.71	3.69	3.76	3.83	3.86	3.86	3.86
Nilai Rerata Per Unsur	5.21	5.39	5.43	5.57	5.36	5.50	5.57	5.54	5.64	5.75	5.79	5.79	5.79
Jumlah Responden	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Jumlah Nilai Perunsur	146	151	152	156	150	154	156	155	158	161	162	162	162
	U2	U4	U5	U10	U11	U12	U13	U14	P1	P2	P3	P4	P5

Berdasarkan Tabel 3.2 hasil Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan pada tanggal 1 s.d 27 Desember 2023 diperoleh nilai indeks dari kelompok unsur pertanyaan survei IPP adalah **3,63** dan pada kelompok unsur pertanyaan survei IPAK diperoleh indeks sebesar **3,83.**

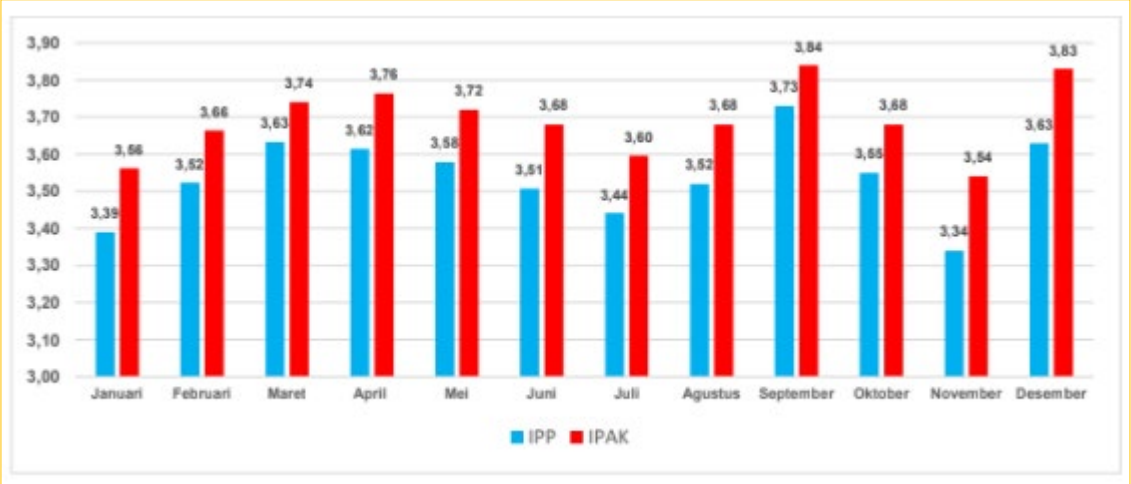

Gambar 3. 30 Tren Hasil Survei IPP dan IPAK sepanjang tahun 2023

Pada Gambar 3.30 hasil Survei IPP selama periode Januari s.d Desember 2023, pencapaian tertinggi terdapat pada bulan September 2023 dengan indeks rata pada ipp 3,52 dan ipak 3,69. Untuk rata – rata indeks gabungan ipp dan ipak selama tahun 2023 yaitu 3,61. Demikian halnya dengan Hasil Survei IPAK pencapaian tertinggi pada bulan September 2023.

SASARAN KEGIATAN 3:

MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER SESUAI PEDOMAN

IKU 7: PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SATKER TERHADAP PEDOMAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 7 adalah:

A. PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN, REVIU, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BPOM

Sebagai wujud upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPOM, pada Tahun 2020 BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM yang memuat tata

cara dan mekanisme penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker hingga pelaksanaan monitoring serta evaluasinya. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis serta adanya berbagai tuntutan suprasistem dan berbagai peraturan terkini terkait akuntabilitas kinerja, maka pada tahun 2021, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menginisiasi dilakukannya perubahan terhadap pedoman tersebut yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 226 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM pada Tanggal 1 November 2022.

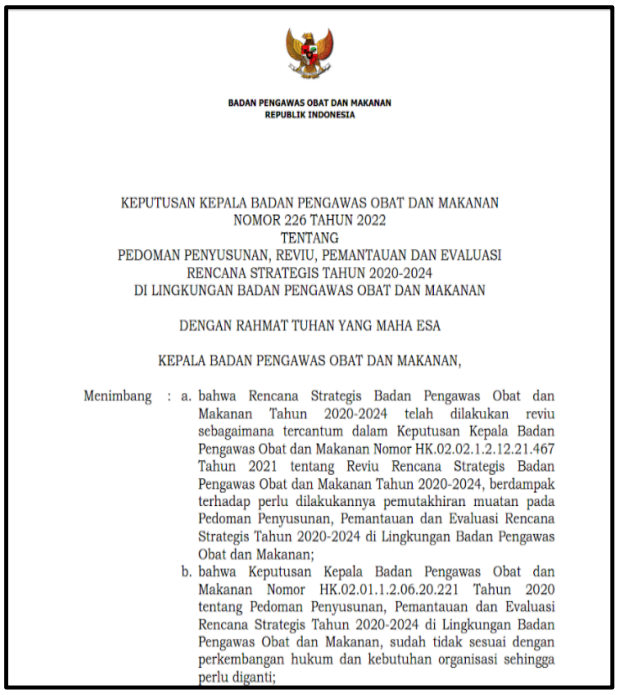

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 226 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, REVIU, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah dilakukan reviu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, berdampak terhadap perlu dilakukannya pemutakhiran muatan pada Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

Gambar 3. 31 Keputusan Kepala BPOM Nomor 226 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Adapun pada revisi pedoman tersebut telah dilakukan penyempurnaan Langkah pengendalian dalam implementasi Renstra, antara lain:

a. Penambahan Bab terkait mekanisme reviu Renstra yang selama ini belum di atur secara khusus.
b. Penekanan terhadap mekanisme revisi Renstra dan perubahan target tahunan dalam Renstra melalui RKT.
c. Penambahan mekanisme terkait penetapan indikator SMART-C.

d. Serta penajaman mekanisme evaluasi paruh waktu dan akhir pelaksanaan Renstra.
e. Selanjutnya, pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPOM pada tanggal 20 Desember 2022 secara hybrid.

Gambar 3. 32 Sosialisasi Secara Hibrid tentang "Penyempurnaan Langkah Pengendalian Dalam Implementasi Renstra"

B. PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL (JUKOP) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TA 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penyusunan Jukop mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran n+1, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan BA MM DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Proses penyusunan Jukop DAK nonfisik BOK POM antara lain:

1. Permintaan masukan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan kepada unit kerja teknis pengampu
2. Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu, dan/atau pakar terkait
3. Konsultasi publik, finalisasi dan harmonisasi Rancangan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan
4. Pengesahan (persetujuan prinsip, penomoran dan penetapan Peraturan BPOM) Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan.

Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu dilakukan secara luring pada tanggal 24 Oktober 2023 di Grand Mansion Menteng, dilanjutkan pada tanggal 23 November 2023 di Aston Kemayoran dan Konsultasi Publik serta Finalisasi dilakukan pada 11 Desember 2023 di Santika Hotel Depok.

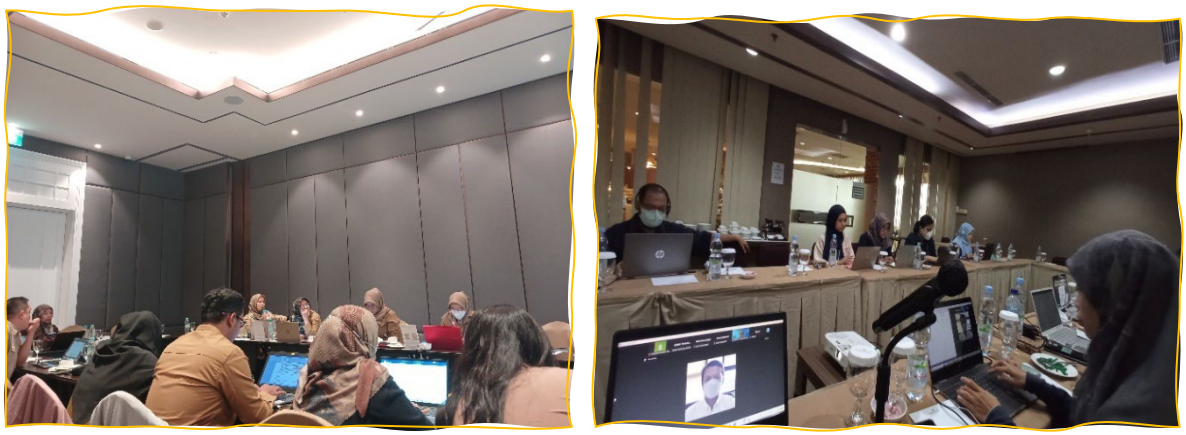

Gambar 3. 33 Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2024

C. RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2023 DI YOGYAKARTA

Gambar 3. 34 Penyerahan Penghargaan Kepada Kepala Unit Kerja dalam Rapat Evaluasi Nasional

Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM tahun 2023 dilaksanakan pada 30 November – 2 Desember 2023 di Yogyakarta dengan mengangkat tema **"Semangat Kolaborasi, Mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Berintegritas Menuju Indonesia Maju"**. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana strategis BPOM 2020-2024 serta melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). REN 2023 dilaksanakan secara kombinasi luring yang dihadiri oleh sekitar 300 orang dan daring yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Yogyakarta.

Kegiatan diawali dengan arahan Plt. Kepala BPOM yang sekaligus secara resmi membuka Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2023. Beliau menyampaikan harapan agar seluruh jajaran BPOM tetap solid, loyal, tangguh, dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tengah berbagai dinamika yang sangat menantang akhir-akhir ini. BPOM telah melakukan langkah-langkah strategis penguatan kelembagaan serta peningkatan sumber daya baik SDM maupun infrastruktur sarana dan prasarana kerja. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan *Integrated Digital Workplace* dan kantor

terstandar untuk mendorong peningkatan produktifitas pegawai, perbaikan berkelanjutan pada aspek kelembagaan serta sarana prasarana bersinergi dengan peningkatan pelayanan publik dan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi pelaku usaha (khususnya UMKM) dan masyarakat semakin memperkuat kapasitas dan kredibilitas BPOM sebagai otoritas regulatori obat dan makanan Indonesia. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi anggaran dan kinerja sangat penting untuk menjadi pijakan penyempurnaan perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran tahun-tahun berikutnya serta mengharapkan acara REN menghasilkan luaran yang implementatif untuk perbaikan perencanaan tahun 2023-2024.

Plt. Kepala BPOM juga menyampaikan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak atas komitmen dan kinerja luar biasa sehingga pada tahun 2023 BPOM kembali meraih sejumlah penghargaan di bidang pelayanan publik, kehumasan, perlindungan konsumen, manajemen SDM, dan sebagainya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber lintas K/L yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Agenda berikutnya adalah evaluasi kinerja dari masing-masing eselon I yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputi Bidang Penindakan; Inspektur Utama; dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing eselon I kemudian melakukan identifikasi masalah dan menentukan rencana tindak lanjut maupun upaya

perbaikan yang diperlukan. Pada sesi Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015, disampaikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) BPOM. Plt. Kepala Badan POM menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen dan kontribusi pada penerapan QMS BPOM sehingga seluruh unit kerja berhasil mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen yang telah diterapkan.

Hasil evaluasi yang diperoleh dalam REN kemudian didokumentasikan dalam Prosiding REN BPOM 2023 dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Badan POM pada periode berikutnya.

D. PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Balai Besar/Balai POM dilakukan melalui kegiatan visitasi/kunjungan asistensi penganggaran dan asistensi penyusunan RKA-K/L di beberapa Balai Besar/Balai POM serta Loka POM yang diidentifikasi membutuhkan asistensi lebih lanjut, yaitu Balai Besar/Balai POM di Jambi, Medan, Yogyakarta, Lampung, Banjarmasin, Ambon, Padang, Palu, Makassar, Kupang dan Serang. Asistensi ke Loka POM di Tasikmalaya, Tangerang, Bogor, Balikpapan, Manggarai Barat, Bangka Belitung, pada rentang waktu Maret hingga Desember 2023.

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi adalah melakukan verifikasi dan *rapid appraisal* terhadap usulan BB/Balai POM dan Loka POM terkait rencana kerja dan anggaran di 2024 baik yang sudah termuat dalam RKA-K/L maupun belum tertampung dalam RKA-K/L 2024. Pendampingan/asistensi RKA-K/L maupun asistensi penganggaran kepada unit Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dilaksanakan oleh pejabat/staf dari Tim Koordinator Fungsi Penganggaran ke Balai Besar/Balai POM dan Loka POM selama 2 sampai 3 hari per kunjungan.

Gambar 3. 36 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM di Jambi, 6 - 8 Maret 2023.

Gambar 3. 37 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Medan, 7 – 9 Maret 2023.

Gambar 3. 38 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Loka POM di Tasikmalaya, 7 – 9 Maret 2023.

Gambar 3. 39 Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Yogyakarta, 8 – 10 Juni 2023.

E. SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Komisi IX DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan dan Kunjungan Kerja Spesifik. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait dalam rangka Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI antara lain:

a. Kunker Spesifik dalam rangka Pengawasan Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 – 2 Februari 2023.
b. Kunker Reses ke Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan pada tanggal 17 – 18 Februari 2023.
c. Kunker Spesifik dalam rangka Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan ke Provinsi Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 28 – 29 Maret 2023.
d. Kunker Reses ke Provinsi Papua Tengah pada tanggal 14 – 15 April 2023.
e. Kunker Reses ke Provinsi Sumatera Utara dan Bali pada tanggal 8 – 9 Mei 2023.

f. Kunker Reses ke Provinsi Aceh, Maluku, Papua Barat Daya pada tanggal 14 – 17 Juli 2023.
g. Kunker Panja Pengawasan mengenai Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat, Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 – 23 September 2023.
h. Kunker Reses ke Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 4 – 5 Oktober 2023.
i. Kunker Spesifik dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 – 23 November 2023.
j. Kunker Reses ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara pada tanggal 6 – 9 Desember 2023.

Kegiatan ini merupakan pendampingan kunjungan kerja Anggota Komisi IX oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPOM. Kegiatan ini dilakukan sejumlah 19 kali yang dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Desember 2023.

Gambar 3. 40 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kota Sorong, 14 - 17 Juli 2023

Gambar 3. 41 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Maluku, 14 – 17 Juli 2023

Gambar 3. 42 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Papua Selatan, 17 - 18 Februari 2023

Gambar 3. 43 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 28 – 29 Maret 2023

Gambar 3. 44 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Lampung, 28 – 29 Maret 2023

Gambar 3. 45 Prosesi Foto Bersama Perwakilan Komisi IX DPR RI bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI dan Perwakilan Pemeritah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 4 – 5 Oktober 2023

F. PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap penggunaan APBN memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR-RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran. Sesuai pembagian tugas komisi, BPOM bermitra dengan Komisi IX DPR-RI yang memiliki lingkup tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Koordinasi dan persetujuan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dapat dilakukan dengan tujuan pendalaman dan persetujuan anggaran serta RDP yang bertujuan khusus seperti tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun bahan paparan pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Mitra Kerja BPOM Mengingat bahan tersebut perlu dipersiapkan secara matang dan akurat, sehingga dibutuhkan suatu pembahasan. Selain itu, kegiatan ini juga berupa pengawalan RDP yang diikuti peserta dari BPOM di Gedung DPR-RI. Pelaksanaan kegiatan RDP antara lain:

- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2024 pada tanggal 15 Februari 2023;
- ✓ RDP Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 pada tanggal 7 Juni 2023;
- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2024 pada tanggal 4 Juli 2023;

- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L Tahun 2024, Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022 dan Pembahasan Usulan Program - Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan Kriteria Teknis dari Komisi pada tanggal 29 Agustus 2023;
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2024 pada tanggal 5 September 2023;
- ✓ RDP Penyesuaian RKA K/L Tahun 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI pada tanggal 13 September 2023.

G. KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR

Tim Koordinator Fungsi Penganggaran perlu melakukan Pertemuan Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor antara lain Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan lintas sektor dari intstansi terkait lain yang diharapkan dapat menjadi pertemuan konsolidasi eksternal untuk melakukan pembahasan bahan penetapan pagu alokasi anggaran tiap unit eselon II Pusat dan UPT Badan POM serta pembahasan yang membutuhkan koordinasi dengan intstansi lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran tahun berjalan seperti revisi anggaran yang melibatkan DJA, tambahan anggaran tahun berjalan, penerbitan SE MP PNBP. Kegiatan yang dilakukan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama lintas sektor antara lain :

- ✓ Pembahasan Kebijakan Penyusunan SBK TA 2024 pada tanggal 11 Mei 2023 di Hotel Santika Megacity Bekasi;
- ✓ Pembahasan Usulan Tambahan Anggaran BPOM TA 2024 pada tanggal 18 Juli 2023 di Hotel Santika Megacity Bekasi;
- ✓ Pembahasan Penganggaran Badan POM TA 2024 pada tanggal 28 Juli 2023 di Hotel Avenzel Bekasi;
- ✓ Pembahasan Rekomendasi Alat Laboratorium oleh PPPOMN pada tanggal 16 Juni 2023 di Hotel Santika Depok;
- ✓ Pembahasan Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2023 terkait Regionalisasi Laboratorium Badan POM pada tanggal 15 Agustus 2023 di Hotel Santika Depok;

- ✓ Pembahasan Anggaran UPT TA 2024 terkait status Loka menjadi Balai pada tanggal 8 September 2023 di Hotel Avenzel Bekasi;
- ✓ Pembahasan Hasil Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 pada tanggal 11 Oktober 2023 di Hotel Avenzel Bekasi.

Gambar 3. 46 Pembahasan Usulan Tambahan Anggaran BPOM TA 2024, Bekasi, 18 Juli 2023.

Gambar 3. 47 Pembahasan Rekomendasi Alat Laboratorium oleh PPPOMN, Depok, 16 Juni 2023

H. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM membutuhkan standar biaya khusus dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku di BPOM dan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L.

SBK merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) dan salah satu fungsinya sebagai batas tertinggi

yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L. SBK juga berfungsi untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran dan alat monitoring dan evaluasi pencapaian output.

Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan cara melakukan reviu dari SBK yang telah dilaksanakan dan masukan terhadap usulan SBK pada tahun 2022. SBK tahun 2023 dilaksanakan untuk kegiatan penyidikan di UPT dan kegiatan Intelijen.

Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2023 di Amaroossa Grande Bekasi.

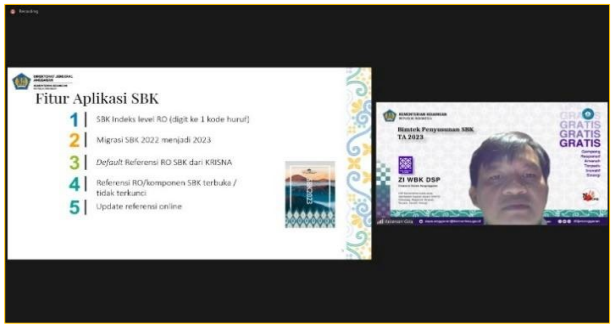

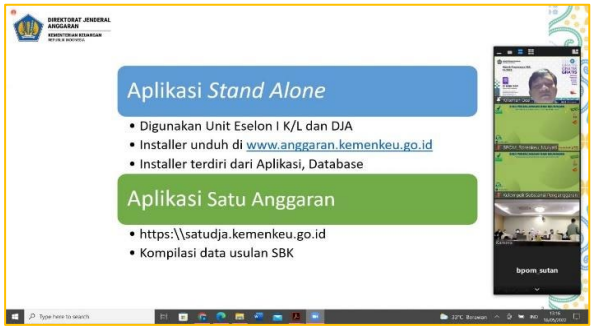

I. PENYELARASAN PENGANGGARAN KEBIJAKAN BARU BPOM TA 2023

Gambar 3. 49 Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2023, Jakarta, 19 – 20 Januari 2023.

Pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Januari 2023 di Aryaduta Menteng. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan

risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat. Untuk itu, telah dilakukan pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA dengan mengundang Unit Pusat terkait dan UPT BPOM di bidang informasi dan komunikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2023 bersama lintas sektor.

Output dari pertemuan ini adalah kesepakatan tata cara pelaksanaan kegiatan KIE TA 2023 serta sebagai masukan dalam Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2023.

Gambar 3. 50 Buku Pedoman Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE

SASARAN KEGIATAN 4:
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM

IKU 8: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 8 adalah:

A. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2022

Laporan tahunan merupakan sumber informasi tentang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan data hasil pengawasan Obat dan Makanan dari unit kerja di pusat dan daerah dengan harapan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Selain masyarakat, instansi terkait juga dapat melihat keberhasilan program yang dikerjakan bersama BPOM di dalam laporan tahunan ini.

Gambar … Buku Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2022

Selain itu, laporan tahunan juga penting untuk menegakkan salah satu azas kepemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan laporan tahunan diperlukan data yang valid dan dapat dipercaya, kajian yang mendalam serta analisis yang tajam. Laporan yang disusun berdasarkan sumber data yang sahih akan menghasilkan informasi yang berharga baik untuk keperluan eksternal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi

yang terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri, maupun untuk keperluan internal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang matang dan handal di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan BPOM menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode tahun 2022 yang mencakup kegiatan standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap daerah membuat standar tersendiri. Kegiatan lain adalah penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dengan maksud agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Kegiatan lain yang ada dalam laporan tahunan BPOM adalah pengawasan setelah beredar (*post-market control*). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kegiatan selanjutnya yang disajikan dalam laporan tahunan BPOM tahun 2022 adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrasif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Sedangkan kegiatan terakhir pada laporan tahunan BPOM adalah manajemen atau tata

kelola pemerintah, fungsi ini sendiri bertugas untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di bidang Obat dan Makanan di Indonesia.

Di dalam laporan tahunan juga disampaikan upaya BPOM dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

B. *LEADERSHIP DIAOGUE* TAHUN 2023

Kegiatan *Leadership Dialogue* Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 30 Januari – 2 Februari 2023 di Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi yang produktif. Peserta *Leadership Dialogue* adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan BPOM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM. Narasumber pada kegiatan ini adalah Sekretaris Utama, Direktur di Kedeputian I, Direktur di Kedeputian II, Direktur di Kedeputian III, Direktur di Kedeputian IV, Inspektur Utama, Kepala Biro di Kesettamaan, dan Kepala Pusat-Pusat.

Kegiatan pada tanggal 31 Januari 2023 dimulai dengan paparan Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 oleh Sekretariat Utama dan dilanjutkan dengan pembukaan dan pemberian arahan oleh Kepala BPOM. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh para narasumber mengenai isu strategis dan kegiatan prioritas di lingkungan kerja masing-masing, di mana pada setiap sesi paparan juga disertai dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2023 dilanjutkan dengan kegiatan *capacity building* yang diikuti oleh seluruh peserta dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, responsifitas, dan kapasitas individu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan dan visi.

Secara umum terdapat tiga isu strategis terkini di BPOM yaitu (1) Proses pengawasan dan penindakan kejahatan obat berupa cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada sirop obat. Upaya perbaikan *gap* pada sistem jaminan keamanan dan mutu obat terus dilakukan dengan melibatkan lintas sektor terkait, termasuk asosiasi dan pelaku usaha. Secara bertahap, BPOM juga merilis daftar produk sirop obat aman setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi oleh Kedeputian I. (2) Memperjuangkan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum BPOM. Urgensi UU ini adalah kemandirian dan independensi BPOM sebagai otoritas regulatori Obat dan Makanan serta penguatan pengawasan dan penindakan. Audiensi dengan menteri dan DPR terus dilakukan untuk mendapatkan dukungan guna mendorong segera terwujudnya UU yang sangat penting ini. (3) Penyederhanaan birokrasi di BPOM telah dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Manajemen kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN akan diterapkan secara utuh pada tahun 2023. Setiap pimpinan unit kerja dan UPT agar memastikan transformasi sistem kerja dan pengelolaan kinerja berjalan dengan baik di masing-masing unit kerjanya.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, arahan Kepala Badan POM untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun 2023 yaitu penguatan kualitas SDM; akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi; melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi; dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

C. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAN PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TAHUN 2023

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dan dituangkan dalam RKAKL, DIPA, dan POK tahun anggaran 2023 dalam proses pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan uraian, sifat dan proses yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, sehingga dalam implementasinya petunjuk teknis tidak dapat dipisahkan dari petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan POM.

Petunjuk pelaksanaan tahun anggaran 2023 ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus. Petunjuk teknis kegiatan tahun anggaran 2023 merupakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya bagi Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia utamanya untuk kegiatan yang pelaksanaannya terpadu dengan unit yang ada di pusat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Juklak akan dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL, SE tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2023 serta peraturan lainnya terkait pelaksanaan anggaran yang akan ditetapkan kemudian sehingga dapat membantu para pengelola anggaran dalam melaksanakan DIPA tahun 2023. Sedangkan petunjuk teknis berisi tentang uraian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang secara substansial terkait dengan kebijakan ditingkat pusat dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan pelaksanaan kegiatan bersifat teknis pada satker pusat dan daerah.

Output dari pertemuan ini adalah buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan buku Petunjuk Teknis Tahun 2023 yang akan dicetak dan disampaikan kepada selurh Satker di Lingkungan BPOM.

Gambar 3. 52 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan

Pertemuan pembahasan penyusunan draft Juklak dan Juknis dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2023 membahas penyusunan draft Juklak dan penyusunan draft Juknis serta finalisasi Juklak pada tanggal 7 – 8 Februari 2023 di Hotel Amaroossa Bekasi secara *hybrid* (daring dan luring) dengan mengundang Narasumber Kementerian Keuangan, perwakilan Unit Eselon II Pusat serta UPT.

Gambar 3. 53 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2023

D. PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2045

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Perencanaan Jangka Panjang POM 2045, sebagai wujud dukungan dalam mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, Badan Pengawas Obat dan Makanan secara proaktif melalui Biro Perencanaan dan Keuangan menginisasi penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah di tetapkan melalui keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045.

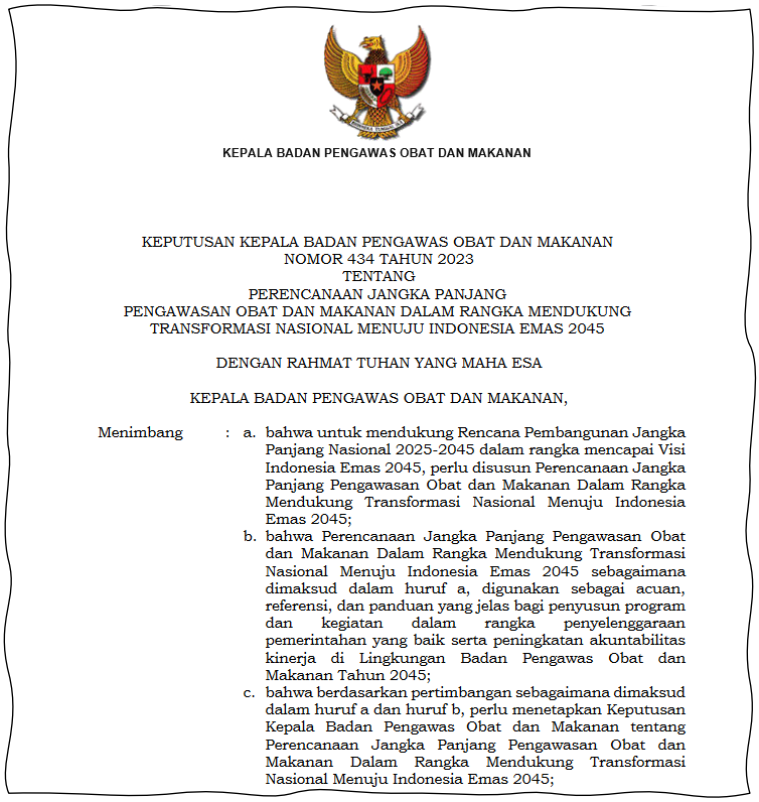

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 434 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN JANGKA PANJANG
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
TRANSFORMASI NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu disusun Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045;

b. bahwa Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai acuan, referensi, dan panduan yang jelas bagi penyusun program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2045;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045;

Gambar 3. 54 Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Gambar 3. 55 Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan

Proses penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 20245 telah melibatkan berbagai macam pihak baik pihak eksternal, pakar dan akademisi untuk memberikan masukan dalam penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045.

Gambar 3. 56 Pertemuan Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045

E. *COACHING* ANALISIS GENDER: PENDALAMAN RANCANGAN AWAL *GENDER ANALYSIS PATHWAY* BERSAMA PAKAR

Pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah seperti yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun begitu, kesadaran tersebut belum banyak terbangun sepenuhnya oleh sebagian besar aparatur negara, sehingga meski pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu dimensi pengarusutamaan pembangunan (*mainstreaming*) selain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sejak RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, masih banyak isu gender dalam pembangunan yang belum terselesaikan.

Pelatihan Analisis Gender dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Unit Kerja Balai POM di Seluruh Indonesia dalam rangka penyusunan rancangan awal GAP (Gender Analysys Pathway) untuk jenis Rincian Output (RO) KIE, UMKM, Desa Pangan Aman, dan Pelayanan Umum di UPT.

Studi **Coaching Analisis Gender: Pendalaman Rancangan Awal Gender Analysis Pathway bersama Pakar.**

Pada awal buln Februari 2023 telah dilakukan pertemuan daring Pelatihan Analisis Gender dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Unit Kerja Balai POM di Seluruh Indonesia dalam rangka penyusunan rancangan awal GAP (Gender Analysys Pathway) untuk jenis Rincian Output (RO) KIE, UMKM, Desa Pangan Aman, dan Pelayanan Umum di UPT. Pelatihan Analisis Gender dilaksanakan dalam beberapa sesi yang berbeda dimana diikuri oleh seluruh UPT Badan POM yang ada di Indonesia. Pada Pelatihan Analisis Gender dalam rangka penyusunan rancangan awal GAP untuk Jenis RO KIE, UMKM, Desa Pangan Aman, dan Pelayanan umum di UPT dipandu oleh beberapa Pakar diantaranya Dr. H. Yusuf Supriadi, MA., dr. Yurni Satria, M.Phil, MHA, dan Yulius Hendra Hasanuddin. Pelatihan Analisis Gender dilaksanakan dalam beberapa sesi hari dimana untuk tanggal 1, 2, dan 3 Februari 2023 berfokus pada RO KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT, untuk tanggal 13, 15, dan 16 Februari 2023 berfokus pada RO UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, untuk tanggal 20, 21, dan 22 Februari berfokus pada RO Desa Pangan Aman, dan tanggal 24 Februari 2023

berfokus pada RO Layanan Umum. 5. Pelatihan diawali dengan pembukaan acara oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM yang dilanjutkan dengan pembagian Breakout Room Zoom yang dipandu oleh beberapa Pakar PUG untuk masing masing room.

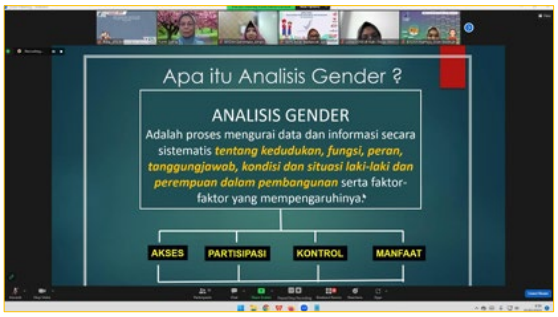

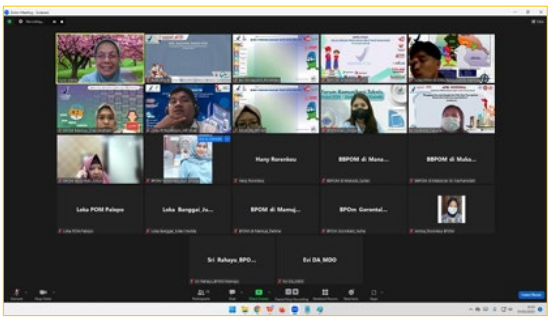

Gambar 3. 57 *Online Coaching* Analisis Gender: Pendalaman Rancangan Awal *Gender Analysis Pathway* bersama Pakar

F. *COACHING* ANALISIS GENDER: PENDALAMAN RANCANGAN AWAL *GENDER ANALYSIS PATHWAY AND GENDER BUDGET STATEMENT.*

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Februari 2023 dilakukan dalam rangka persiapan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan BPOM, dalam menyusun rancangan awal Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement. 2. Pertemuan dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja pusat yang merupakan pengampu kegiatan terkait UMKM dan KIE. 3. Kegiatan pelatihan diawali dengan mengerjakan soal pre-test oleh seluruh peserta untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mereka terkait Pengarusutamaan Gender (PUG).

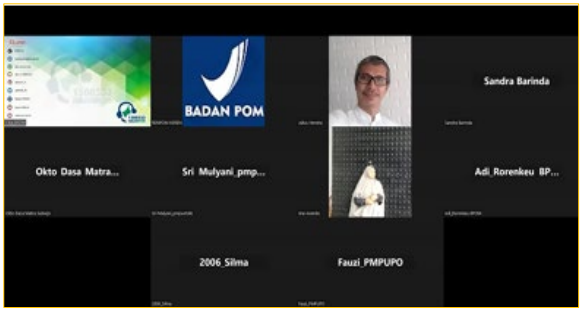

Gambar 3. 58 *Online Coaching Analysis Gender and Gender Budget Statement*

G. PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA POKJA PUG BPOM

Dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang kapasitas dan sensitivitas gender, maka pada tanggal 3-7 Juli 2023 dilakukan pelatihan PPRG dengan fasilitator pakar gender dan dilakukan dengan metode luring. Hal ini dilakukan karena sasaran kegiatan yang berbeda beda sehingga dapat lebih fokus. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan awareness, sensitifitas, dan kepedulian terhadap isu gender, meningkatkan pemahaman terkait Analisa gender, memantik inisiatif dan keaktifan masing -masing anggota Pokja/ Subpokja terhadap implementasi PUG. 2. Pertemuan difasilitatori oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender, Penasihat PATTIRO).

Pertemuan yang dilaksanakan pada 17 Juli 2023 ini dilakukan dengan tujuan untuk Meningkatkan awareness, sensitifitas, dan kepedulian terhadap isu gender, meningkatkan pemahaman terkait Analisa gender, memantik inisiatif dan keaktifan masing -masing anggota Pokja/ Subpokja terhadap implementasi PUG. 2. Pertemuan difasilitatori oleh Bapak Yulius Hendra (pakar gender, Penasihat PATTIRO).

Gambar 3. 60 Foto Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota pokja PUG BPOM

H. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPOM TAHUN 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM merupakan tindaklanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2022 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2024. Tujuan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2024 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM pada Tahun Anggaran 2024.

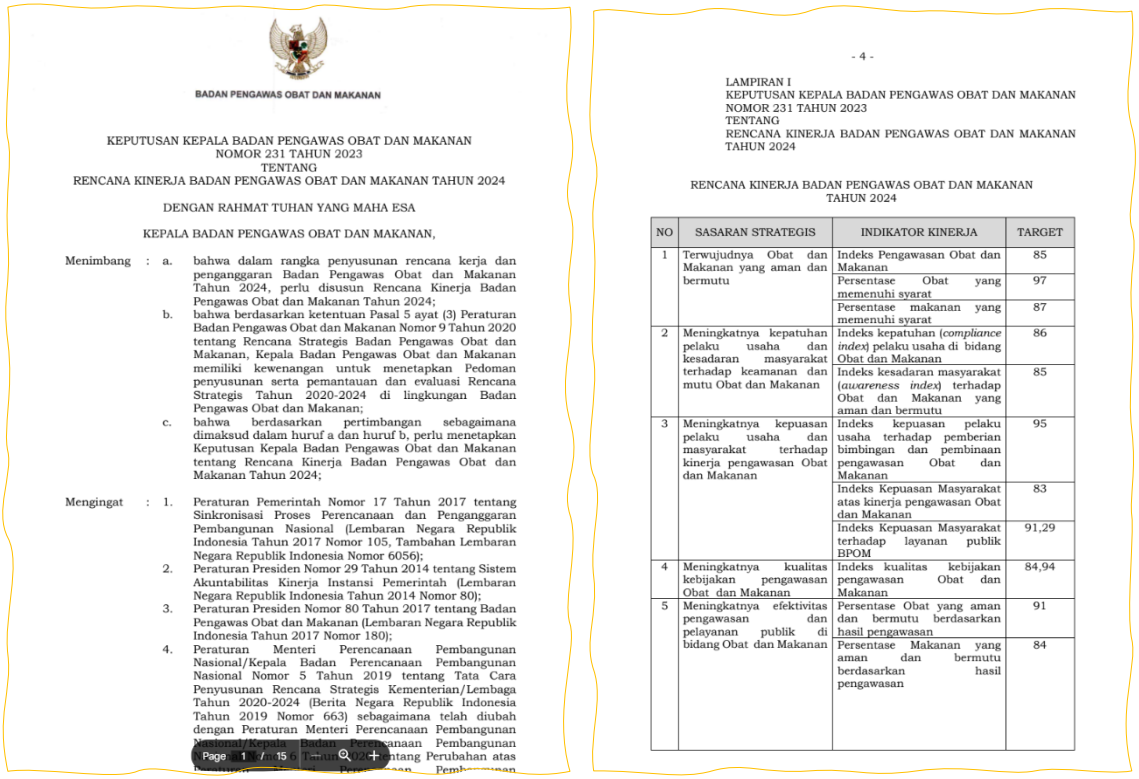

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	85
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

Gambar 3. 61 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2024.

I. PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Badan POM saat ini berupaya untuk melakukan pengembangan model Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya tersebut dilakukan melalui menyusun model indeks yang dimulai dari Produk Pangan, sebagai kegiatan awal dalam pengembangan model indeks ini. Jenis-jenis pangan yang beragam di masyarakat dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, menjadi tantangan pengawasan bersama antar lintas sektor. Kegiatan Pembahasan Indikator Kinerja Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan secara parallel pada tangggal 20 mei, 15 Agustus, 10 November dan 26 Oktober 2022 dengan Prof. Dedi Fardiaz.

Pemaparan materi disampaikan oleh Prof. Dedi Fardiaz terkait Konsep Penyusunan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan. Masukan pada diskusi ini agar focus indeks ini tidak hanya di pangan olahan, tetapi juga pangan keseluruhan dan pembahasan terkait Konsep *Result Based Monitoring and Evalutaion* dan pentingnya indikator *outcome.*

Selanjutnya pertemuan membahas tentang Indikator Presentase Obat yang memenuhi syarat, pembahasan juga terkait data sampling, sample obat yang di sampling akan di uji sesuai dengan regionalisasi Lab dan Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a) Tidak Memiliki NIE/Produk illegal termasuk palsu b) Produk kadaluwarsa c) Produk rusak d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada pertemuan tersebut juga membahas tentang indikator POM, terdapat 2 (dua) indikator yang akan dijadikan alternatif pembangunan POM, 1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Kajian ini masih diperlukan mengigat Bappenas memiliki kecendrungan untuk menggunakan indikator berupa persentase yang lebih dapat terbaca maknanya. 2) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM), pengembangan IPOM tersebut telah disusun kajian awal dengan pilot model saat ini untuk pengawasan Pangan Olahan.

J. Penyusunan Petunjuk Operasional (Jukop) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penyusunan Jukop mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran n+1, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan BA MM DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Proses penyusunan Jukop DAK nonfisik BOK POM antara lain:

1. Permintaan masukan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan kepada unit kerja teknis pengampu
2. Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu, dan/atau pakar terkait
3. Konsultasi publik, finalisasi dan harmonisasi Rancangan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan
4. Pengesahan (persetujuan prinsip, penomoran dan penetapan Peraturan BPOM) Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan.

Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu dilakukan secara luring pada tanggal 24 Oktober 2023 di Grand Mansion Menteng, dilanjutkan pada tanggal 23 November 2023 di Aston Kemayoran dan Konsultasi Publik serta Finalisasi dilakukan pada 11 Desember 2023 di Santika Hotel Depok.

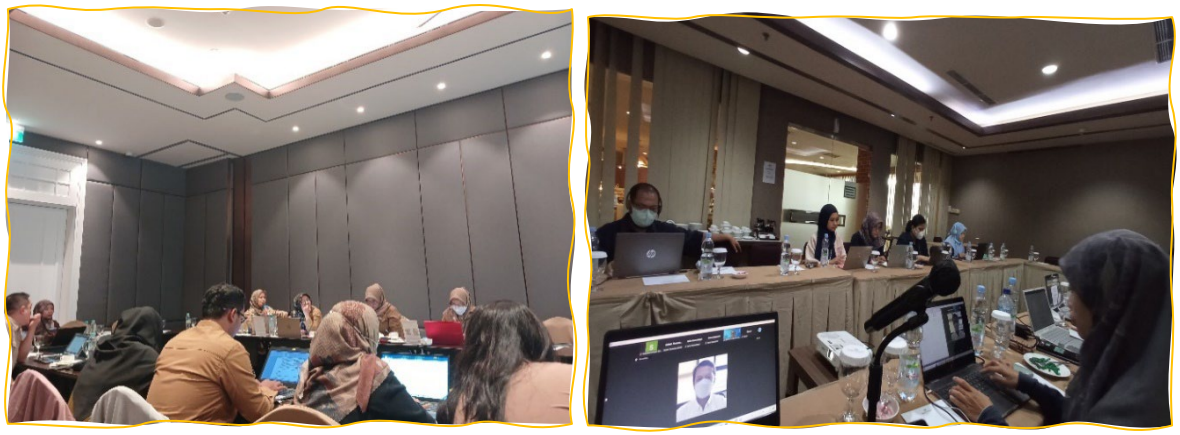

Gambar 3. 64 Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2024

K. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BPOM

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

Dalam hal pembiayaan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan pelaksanaan operasional pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui penyediaan BOK POM.

Siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik BOK POM mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perencanaan diawali dengan penyusunan rancangan arah kebijakan DAK Nonfisik dan rancangan jenis DAK Nonfisik antara Bappenas dan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk selanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, sebagaimana tampak pada ilustrasi berikut:

Gambar 3. 65 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM

Berdasarkan Berita Acara Multilateral Meeting (BA MM), DAK Non Fisik BOK POM TA 2024 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 150 Milyar,- untuk 384 Kabupaten/Kota yang tersebar di 36 Provinsi.

L. MONITORING DAN EVALUASI DAK NON FISIK BOK POM

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan DAK, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Biro Perencanaan dan keuangan melaksanakan Monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2023 pada saat pembinaan/pendampingan oleh unit kerja teknis pengampu per regional. Selain itu, monev juga dilakukan secara berkala melalui daring antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2023 dengan BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, unit kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) yang membahas progres realisasi anggaran dan output, hambatan/kendala dan rencana tindak lanjut.

Gambar 3. 66 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota baik secara luring maupun daring

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Pertemuan Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2022 dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada hari Jumat, 19 Mei 2023 di Hotel Grand Mansion, Jakarta yang mengundang unit pengampu DAK Nonfisik di BPOM Pusat, Inspektorat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis POM. Monev Terpadu DAK NF BOK POM TA 2022 bertujuan membahas capaian kegiatan dan realisasi anggaran DAK NF POM sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan perencanaan ke depan. Tindak lanjut pertemuan ini antara lain:

- ✓ Meningkatkan koordinasi unit kerja teknis pengampu dan UPT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Obat dan Makanan.
- ✓ Meningkatkan pembinaan/pendampingan dan monev terhadap pelaksanaan DAK baik secara mandiri atau bersama sama Unit Pusat.
- ✓ Meningkatkan kepatuhan UPT dalam memverifikasi terhadap pelaporan pelaksanaan DAK yang disi oleh Dinas Kesehatan melalui SMART POM.

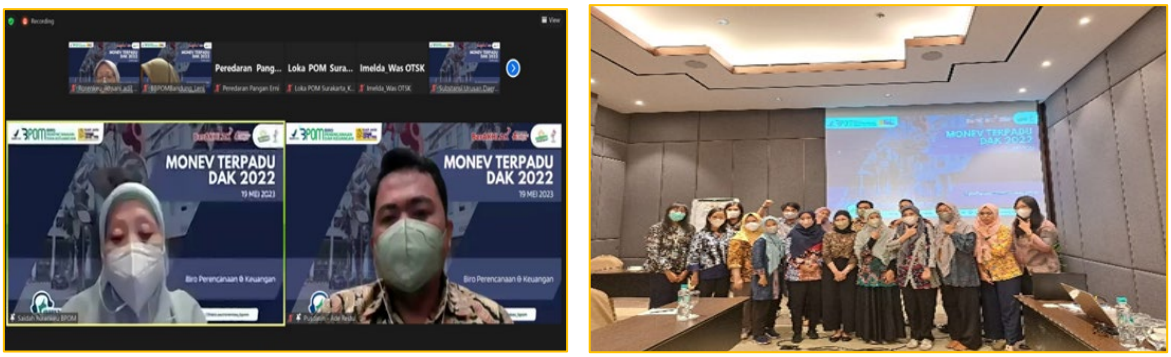

Gambar 3. 67 Pertemuan Monev Terpadu DAK Nonfisik BOK POM

Pada tahun 2023, realisasi anggaran DAK NF BOK POM yang dilaporkan oleh 359 Dinkes Kabupaten/kota melalui aplikasi SMART POM adalah sebesar Rp119,826,785,798,- (79,88%) dari pagu Rp150.000.000.000,-

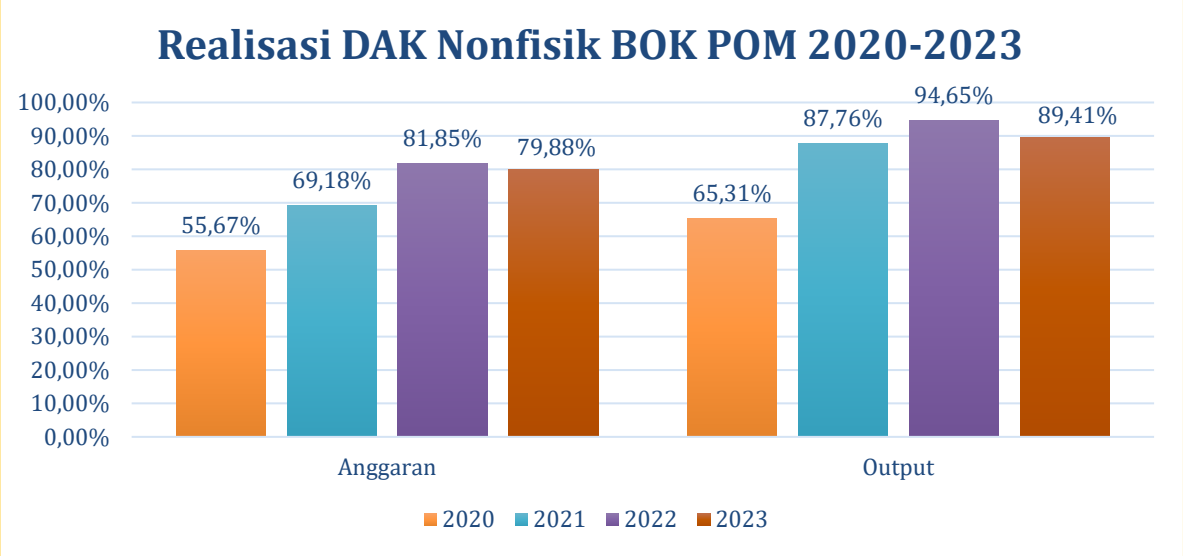

Gambar 3. 68 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2023

Berdasarkan grafik tesebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi anggaran maupun capaian output DAK Nonfisik BOK POM dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 namun masih lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021.

Ditinjau dari tingkat kepatuhan pelaporan, Jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana terdapat 60 Kab/Kota yang tidak melakukan pelaporan melalui SMARTPOM dan tahun 2021 terdapat 25 Kab/Kota dengan realisasi 0% atau tidak melaporkan realisasi

melalui SMARTPOM, maka pada tahun 2023 seperti halnya dengan tahun 2022 terdapat perbaikan tingkat kepatuhan pelaporan, dimana seluruh Kab/kota sudah melaporkan realisasi melalui SMARTPOM.

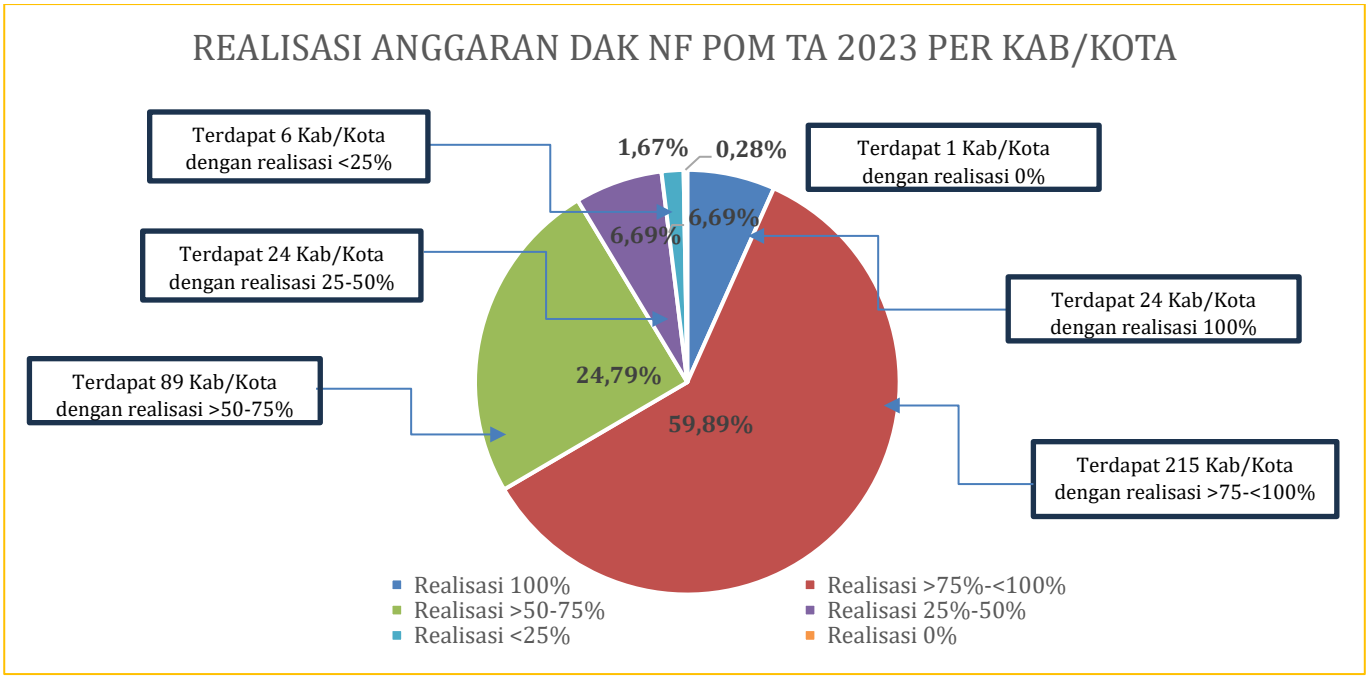

Gambar 3. 69 Realisasi Anggaran DAK Nonfisik BOK POM per Kabupaten/Kota Tahun 2023

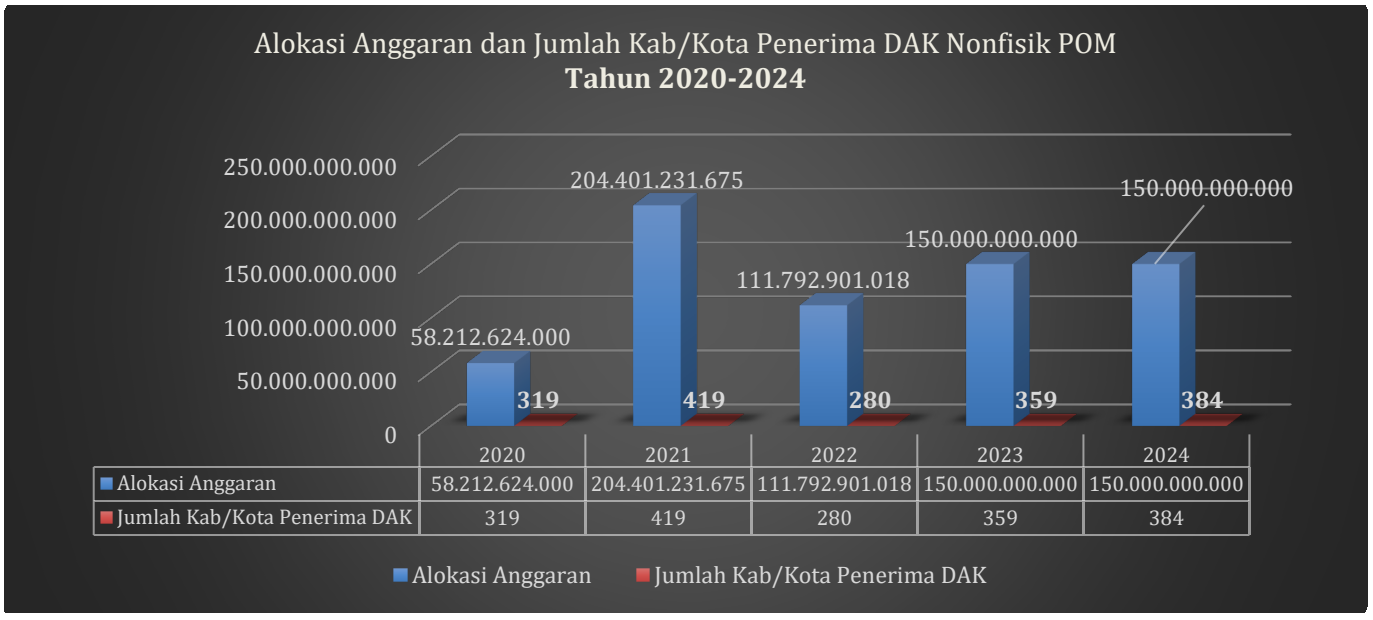

Gambar 3. 70 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2024

Berdasarkan BA MM tersebut, Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui aplikasi SMART POM dengan tautan https://smartpom.pom.go.id. Usulan RKA tersebut ditelaah oleh BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, Unit Kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) melalui kegiatan *desk*/penelaahan RKA DAK Nonfisik BOK POM TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 17-20 Oktober 2023 secara luring untuk penelaahan awal BOK POM TA 2023 dan tanggal 7-10 November secara hybrid (daring/luring) dengan turut mengundang Dinas Kesehatan Penerima DAK NF BOK POM TA 2024 di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat untuk penelaahan lanjutan BOK POM TA 2024. RKA yang telah disepakati dialokasikan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Gambar 3. 71 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2024

M. PENGELOLAAN HIBAH

Hibah merupakan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Salah satu postur Pendapatan Negara dalam APBN 2023 adalah Hibah. Hibah dikenal sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang cepat, lentur dan luwes dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam postur APBN, Penerimaan Hibah merupakan salah satu Pendapatan Negara yang digunakan untuk mendukung Program Pembangunan Nasional, mendukung Penanggulangan Bencana Alam, dan Bantuan Kemanusiaan.

Kementerian Keuangan pada tahun 2022 telah mengembangkan Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah terintegrasi (SEHATI) yang merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang menyatukan beberapa aplikasi dalam satu portal besar untuk

membentuk database dalam rangka mendukung Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan terkait dengan *office automation* dan data *driven decision making*. Fitur yang terdapat dalam SEHATI antara lain:

- ✓ Modul E-Register : menyediakan fasilitas Permohonan Registrasi, Pemutakhiran Data, dan Pembatalan Hibah dapat dilakukan secara online dimanapun dan dapat dipantau secara real time.
- ✓ Modul Monitoring Pengelolaan Hibah: mencakup pemantauan pertanggungjawaban hibah mulai dari register sampai dengan pengesahan.
- ✓ Modul E-Konfirmasi Penerimaan Hibah: menyediakan fasilitas konfirmasi penerimaan hibah antara Pemerintah dengan K/L dan Donor.
- ✓ Modul *Reporting:* menyediakan berbagai jenis informasi hibah yang dibutuhkan *stakeholders.*
- ✓ Fitur yang sudah diimplementasikan sampai dengan tahun 2022 adalah modul e-register Dimana BPOM pada tahun 2022 telah melakukan e-Register SEHATI) baik untuk user admin K/L maupun 83 admin satker.

Pada akhir tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyempurnakan dan meluncurkan Aplikasi SEHATI dengan menambahkan Modul Monitoring Hibah, Modul e-Konfirmasi, dan Modul Reporting. Modul Monitoring Hibah dan Modul Reporting berisi data realisasi dan status hibah.

Kegiatan Pengelolaan Hibah Tahun 2023 dimulai dengan membuat Kep BPOM No 297 tahun 2023 tentang Pengelola Admin Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi pada lingkungan Badan Pengawasa Obat dan Makanan, selanjutnya dilakukan pula reviu SOP pengelolaan hibah dan Menyusun pedoman tata cara penerimaan dan pengelolaan hibah dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kegiatan asistensi dan bimtek pengelolaan Hibah pada Satker BPOM yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023, sebagai berikut:

- ✓ Sosialisasi dan bimtek Pengelolaan Penerimaan Hibah di Satuan Kerja Badan POM Tanggal 16 Oktober 2023 secara daring.
- ✓ Pertemuan monev hibah dengan satker terkait progress penerimaan dan pemutakhiran register hibah WHO dan progress hibah Tanah pada beberapa Loka dan Balai POM pada tanggal 16 Oktober 2023, 3 Nopember 2023, dan 27 Nopember 2023

- ✓ Pelaksanaan forum Koordinasi Pengelola Hibah Tanggal 21 Nopember 2023 di Grand Mercure Kemayoran. Permintaan Monev Realisasi Penerimaan Hibah TW IV 2023 dilingkungan BPOM.
- ✓ Rapat Monev Penerimaan Hibah secara berkala tiap triwulan untuk setiap satker dilingkungan BPOM.

Hibah yang diterima BPOM selama tahun 2023 merupakan hibah langsung yang dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Berikut siklus pengelolaan hibah:

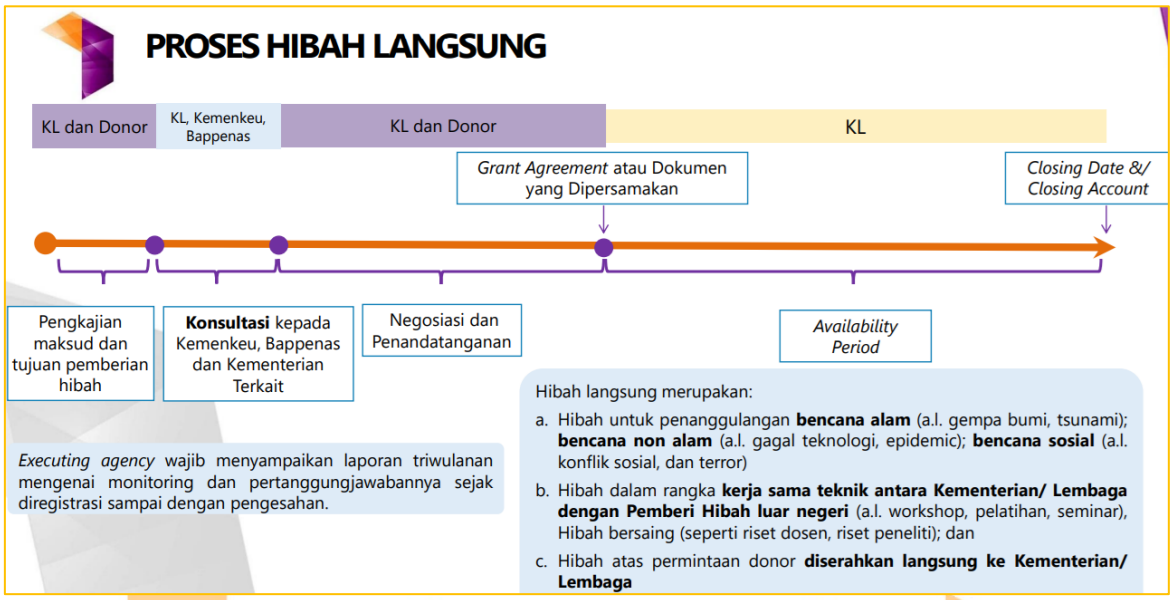

Gambar 3. 72 Siklus Hibah

Proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilakukan oleh masing-masing Satker di BPOM. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hibah Satker setiap triwulan yang bertujuan untuk memantau kemajuan pengelolaan hibah, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

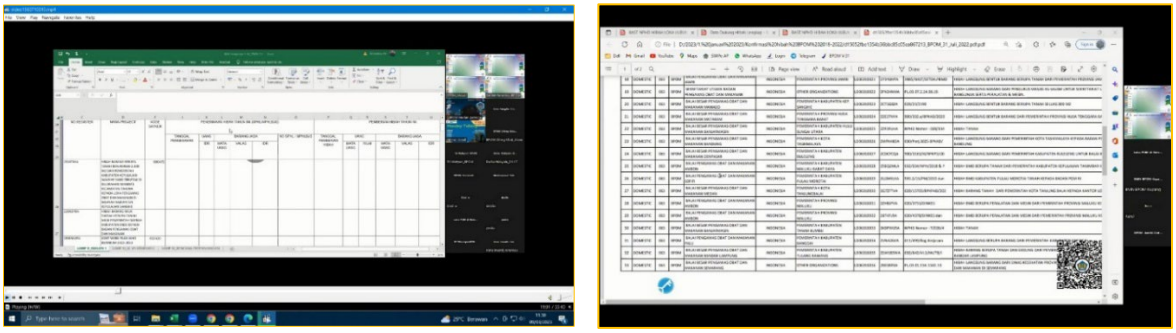

Gambar 3. 73 .Monitoring dan Evaluasi Hibah

Berdasarkan hasil monev pengelolaan hibah tersebut, Badan POM selaku *executing agency* melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Menteri Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan pelaporan, Menteri PPN/ Bappenas.

Tahun 2023 Badan POM melakukan pelaporan terhadap penerimaan dan pengesahan Hibah langsung Uang dan Barang/jasa sebanyak 11 penerimaan hibah yang terdiri atas:

a. Hibah Uang

Tabel 3. 3 Data Hibah Uang

No	No Register	Nama Hibah	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Belanja
1	28WNA3FA	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 INDONESIAN FDA AND WHO COUNTRY OFFICE INDONESIA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	WHO	Uang	Rp 525.778.273,00
2	23LNGDLA	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	WHO	Uang	Rp 3.154.893.000,00
						Rp 3.680.678.000,00

b. Hibah Barang

Tabel 3. 4 Data Hibah Barang

No	No Register	Nama Hibah	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
1	2VKUT3ZA	HIBAH BARANG BERUPA TANAH DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KALIMANTAN UTARA	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	PROPINSI KALIMANTAN UTARA	TANAH	Rp 487.215.840,00
2	2RCBHFBA	HIBAH BARANG BERUPA TANAH DARI DONOR PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI KEPADA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN KANTOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	PEMERINTAH KABUPATEN MOROTAI	TANAH	Rp 829.818.654,00
3	2T4Y7H5A	HIBAH ASET TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SAMBAS	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	TANAH	Rp 20.535.103,00
4	29UMP6JA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG	TANAH	Rp 61.359.720,00
5	2PECM8UA	HIBAH TANAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	TANAH	Rp 1.172.200.000,00
6	26F3FNYA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS BERUPA TANAH KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	TANAH	Rp 172.924.523,00
7	2GS49WYA	PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH	BALAI POM DI SURAKARTA	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	TANAH	Rp 1.427.424.000,00

No	No Register	Nama Hibah	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
8	2Y14P47A	HIBAH BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DENGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO	TANAH	Rp 248.000.000,00
9	23LNGDLA	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	WHO	BARANG	Rp 395.000.000,00
						Rp. 3.643.450.040,00

IKU 9: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SETTAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 9 adalah:

N. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan dokumen evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan untuk perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Sekretariat Utama dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM ke depan.

Laporan kinerja ini berisi hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah. Selain itu juga terdapat perbandingan nilai realisasi indikator dengan K/L lain. Rekomendasi yang diberikan antara lain agar dapat mengkuantifikasikan perhitungan efisiensi sumber daya dan menganalisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Laporan kinerja juga diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi BPOM. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kegiatan yang mempunyai daya ungkit secara signifikan dalam mencapai visi dan misi BPOM sehingga dapat ditetapkan prioritas kegiatan untuk perencanaan selanjutnya, mengingat sumber daya dan sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang. Sebagai salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja, pelaporan kinerja memiliki bobot 15%, yang meliputi: sub komponen keberadaaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%). Tahun 2023 komponen ini mendapatkan nilai sebesar 12,23.

O. LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Pada laporan tahunan 2022 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 8 Sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu:

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM
3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM
4. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM
5. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP
6. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman
8. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar
9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar
10. Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan
11. Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan
12. Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik
13. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sebagian besar kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf dengan upaya seoptimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti kurangnya tenaga SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diharapkan kedepan, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal yaitu para *stakeholders*.

P. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT UATAMA TAHUN 2024

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama merupakan tindaklanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2021 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2024. Tujuan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2024 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2024.

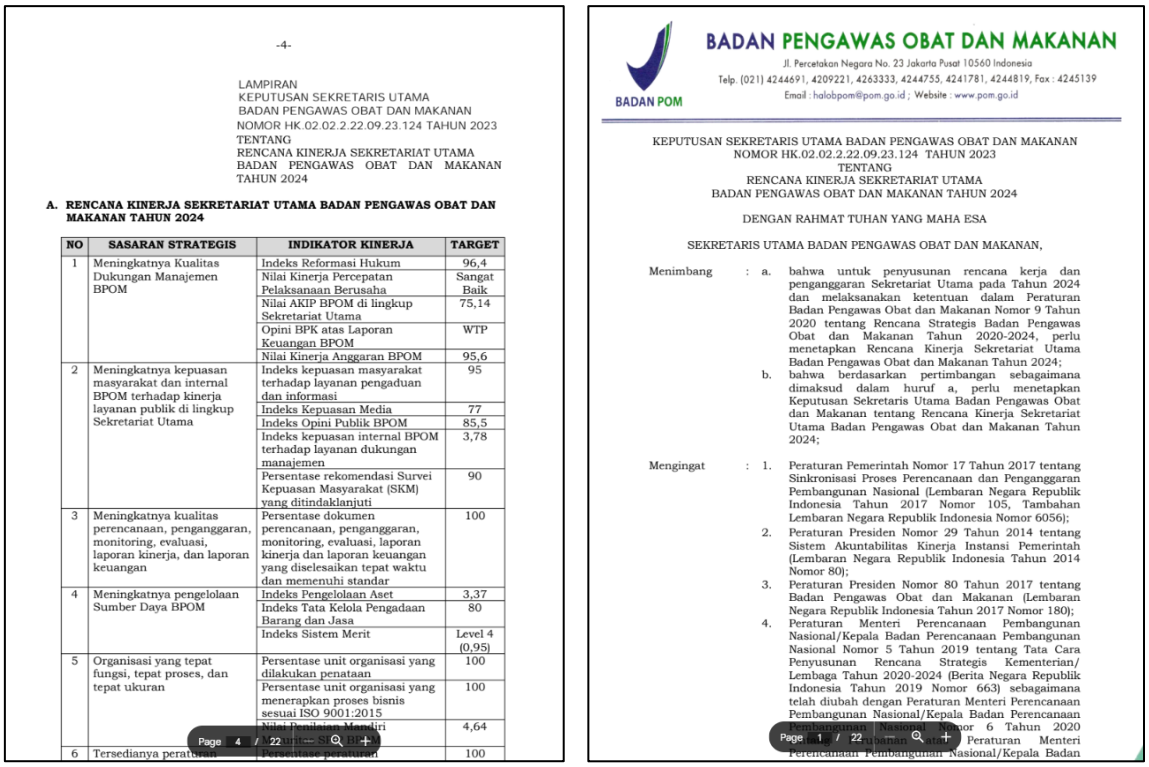

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.09.23.124 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

A. RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Indeks Reformasi Hukum	96,4
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	75,14
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95
		Indeks Kepuasan Media	77
		Indeks Opini Publik BPOM	85,5
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	3,37
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,95)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
		Nilai Penilaian Mandiri	4,64
6	Tersedianya peraturan	Persentase peraturan	100

Page 4 / 22

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.22.09.23.124 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Page 1 / 22

Gambar 3. 76 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 5:
TERWUJUDNYA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG EFEKTIF

IKU 10: INDEKS REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 10 adalah:

A. RAPAT TINJAU MANAJEMEN TAHUN 2023

Pertemuan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2023 di Avenzel *Hotel and Convention.* BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Salah satu upaya peningkatan sistem secara berkelanjutan adalah pelaksanaan Awareness ISO 9001:2015 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang semakin baik dan memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan kebijakan mutu, sasaran mutu yang relevan, efektivitas sistem manajemen mutu termasuk manfaat dari kinerja mutu, manajemen risiko serta dampak dari ketidaksesuaian penerapan dengan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Pada agenda Rapat Tinjauan Manajemen, akan dibahas beberapa hal baik input dan output yang dipersyaratkan dalam ISO 9001:2015, guna memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas dan keselarasan dengan arah strategis organisasi, serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan:

Tabel 3. 5 RENCANA TINDAK LANJUT RTM 2023

NO	REKOMENDASI	PIC	TINDAK LANJUT
1.	Penetapan Grand Desain Pengawasan Obat dan Makanan menuju 2045	Perencanaan	Rencana *launching* dokumen RPJPN 2025-2045 pada 15 Juni 2023, sehingga perlu dilakukan pembahasan secara intensif bersama Tim PJP POM dalam rangka penyempurnaan Rancangan PJP POM 2045 pada TW III 2023 serta pakar untuk diusulkan penetapannya oleh Kepala BPOM.
2.	Penetapan Pedoman Perencanaan & Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) di lingkungan BPOM	Perencanaan	Pertemuan berkala Pokja PUG BPOM untuk perencanaan rencana aksi dan monev implementasi Bimtek analisis gender terhadap RO tertentu bagi UPT dan unit pusat terkait dalam rangka menyusun rancangan GAP dan GBS, untuk menjadi bahan pedoman PPRG
3.	Penetapan Pedoman Manajemen Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM	Perencanaan	Telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM no.141 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Kinerja Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM.
4.	Penetapan Petunjuk Teknis Perencanaan Tahunan di Lingkungan BPOM	Perencanaan	Telah disusunnya rancangan Pedoman Perencanaan Tahunan
5	Revisi Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan	Perencanaan	Telah ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM No.226 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusuan,

NO	REKOMENDASI	PIC	TINDAK LANJUT
	Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan		Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM.
6	Revisi pedoman SAKIP di lingkungan BPOM dan pedoman monev dan pelaporan kinerja di lingkungan BPOM	Monev dan Lapkin	Telah ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM No.128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Telah ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM No.192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM.
7	Integrasi aplikasi SAKTI dan aplikasi monev BOC dengan aplikasi SIMETRIS	Monev dan Lapkin	Telah dilakukan integrasi SAKTI dengan SIMETRIS diakhir tahun 2022. Integrasi aplikasi Monev/RHPK BOC dengan SIMETRIS sedang berproses dan rencana selesai di tw 3 tahun 2023.
8	Penetapan Pedoman Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	UDH, Keuangan dan Inspektorat	Telah diusulkan SOP Makro Penilaian PIPK melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan no. OT.02.01.21.216.05.23.217 tanggal 31 Mei 2023.
9	Penetapan Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Badan POM	UDH	Penyampaian Juknis pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang, Baang/Jasa/Surat Berharga di Lingkungan BPOM melalui surat Plt. Sestama no.B-HK.02.02.2.21.09.22.702 tanggal 19 September 2022. Draf Keputusan BPOM tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hibah di Lingkungan BPOM. Telah diusulkan revisi SOP Pengelolaan Hibah melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan no.OT.02.01.21.216.06.23.227 tanggal 9 Juni 2023 ke Biro Hukor.
10	Penetapan Pedoman DAK NF POM	UDH	Draf Pedoman Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK NF BOK POM.
11	Penyusunan Modul Penganggaran dalam Aplikasi SIMETRIS	Penganggaran	Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Simetris (menu Renja) masih berproses dan direncanakan selesai di tw 3 tahun 2023.

NO	REKOMENDASI	PIC	TINDAK LANJUT
	untuk mendukung indeks anggaran dalam rincian output		

B. RAPAT MPH 2024 DIALOG KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPOM

Rapat diadakan di Bekasi pada tanggal 13 Februari 2024, membahas penyusunan MPH Biro Perencanaan dan Keuangan masih dalam proses dikarenakan beberapa Ketua Tim masih belum menyelesaikan MPH masing-masing. Batas waktu untuk draft MPH Biro Perencanaan dan Keuangan versi excel (dikarenakan aplikasi SIMAKIN belum siap) tanggal 16 Februari 2024. Menurut rekomendasi dari Biro SDM, dimohon untuk mendiskusikan MPH Ketua dan Anggota Tim Kerja pada masing-masing fungsi, karena indikator pembentuk menempel di Ketua Tim. Ketua Tim Pokja dimohon untuk melihat lagi siapa saja anggota tim beserta tugasnya, dikarenakan anggota tim hanya boleh dibawah maksimal 5 Ketua Tim agar lebih efektif.

Kesepakatan nama anggota tim dalam pelaksanaan / implementasi RB/ ZI, AoC, CC, QMS, SPIP, MR, AI, Arsip, Penanggung Jawab Data akan menjadi pembagian tugas dalam MPH dan SK tim sedang berproses. Terdapat 3 unsur terkait layanan internal yaitu ketepatan, prosedur dan sarana prasarana, sehingga akan ada suatu intervensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Untuk sarana prasarana dapat menyediakan tempat untuk layanan dan akan dilakukan sosialisasi mengenai layanan yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Hasil Reviu Penilaian Kinerja Tahun 2023 oleh Biro SDM. Untuk mempertimbangkan ketersediaan jumlah SDM, kompetensi SDM, dan pemerataan anggota tim berdasarkan jenjang jabatan saat pembentukan tim kerja.

Dalam menentukan target kinerja, untuk memperhatikan bahwa penggunaan *range* hanya untuk RHK yang capaian kinerjanya tidak dapat diprediksi secara tepat, target *range* tidak boleh dimulai dari angka 0, Ketua dan anggota Tim yang mendapatkan indikator yang sama sebaiknya memiliki satuan target yang sama dan satuan target kinerja dengan persentase sebaiknya dilengkapi dengan kertas kerja penetapan dan pembagian target kinerja.

Dalam memanfaatkan kriteria pemenuhan ekspektasi untuk pendistribusian nilai istimewa kepada pegawai. Hal ini akan dinilai oleh Biro SDM, akan ada pemeringkatan, dan biasanya di REN / Rakor SDM akan muncul. Rorenkeu belum memanfaatkan pendistribusian nilai istimewa berdasarkan kriteria pemenuhan ekspektasi. Belum ada kesepakatan di antara Ketua Tim bagaimana kriteria untuk pendistribusian nilai Istimewa.

SASARAN KEGIATAN 6:
TERWUJUDNYA SDM BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BERKINERJA OPTIMAL

IKU 11: INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 11 adalah:

A. PENINGKATAN KINERJA DAN KOMPETENSI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (NETRALITAS PEGAWAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM) TAHUN 2024

Pertemuan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam arahannya, Kepala Biro menyampaikan kepada seluruh pegawai agar menindaklanjuti surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.7.71.12.23.704 tanggal 5 Desember 2023 tentang Pemberitahuan dan

Internalisasi Surat Edaran Plt Kepala BPOM tentang Pengawasan Terhadap Netralitas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan isi, maksud dan tujuan dari Surat Edaran Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Pl.06.07.1.7.12.23.03 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Netralitas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta penjatuhan sanksi bila dilakukan pelanggaran. Adapun isi dari Surat Edaran dimaksud sebagai berikut: a. Untuk memberikan informasi dan instruksi kepada seluruh Pegawai di lingkungan BPOM terkait pelaksanaan kewajiban dan menjauhi larangan sebagai Pegawai dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. b. Sebagai upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Pegawai di lingkungan BPOM pada pelaksanaan Pemilihan Umum.

SASARAN KEGIATAN 7:
MENGUATNYA DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 12: INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BAIK

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 12 adalah:

A. PEMELIHARAAN ALAT PENGOLAH DATA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan telah malaporkan 87 kasus pemeliharaan alat pengolah data dan sarana, melalui aplikasi yang dibangun oleh ROUM, bernama SIROUM (Sistem Informasi Biro Umum) yang untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh tim support teknis dari Pusdatin atau Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Biro Umum maupun Pusdatin, adapun data tersebut sebagai berikut:

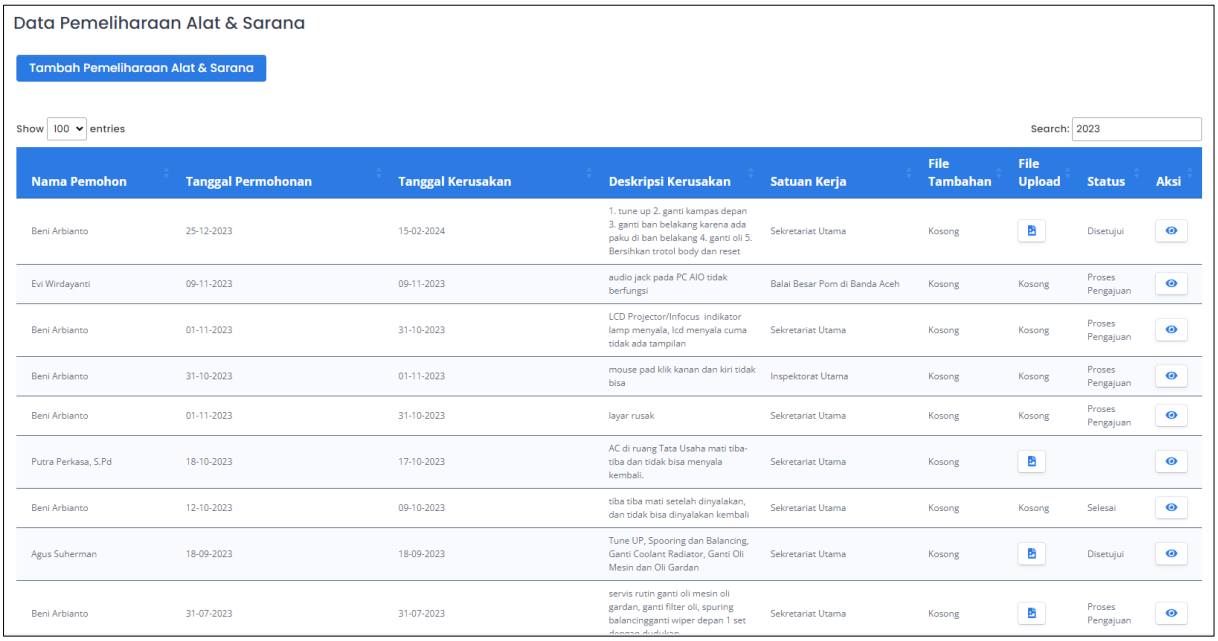
Data Pemeliharaan Alat & Sarana

Tambah Pemeliharaan Alat & Sarana

Show 100 entries Search: 2023

Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Tanggal Kerusakan	Deskripsi Kerusakan	Satuan Kerja	File Tambahan	File Upload	Status	Aksi
Beni Arbianto	25-12-2023	15-02-2024	1. tune up 2. ganti kampas depan 3. ganti ban belakang karena ada paku di ban belakang 4. ganti oli 5. Bersihkan trotol body dan reset	Sekretariat Utama	Kosong		Disetujui	
Evi Wirdayanti	09-11-2023	09-11-2023	audio jack pada PC AIO tidak berfungsi	Balai Besar Pom di Banda Aceh	Kosong	Kosong	Proses Pengajuan	
Beni Arbianto	01-11-2023	31-10-2023	LCD Projector/Infocus indikator lamp menyala, lcd menyala cuma tidak ada tampilan	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Proses Pengajuan	
Beni Arbianto	31-10-2023	01-11-2023	mouse pad klik kanan dan kiri tidak bisa	Inspektorat Utama	Kosong	Kosong	Proses Pengajuan	
Beni Arbianto	01-11-2023	31-10-2023	layar rusak	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Proses Pengajuan	
Putra Perkasa, S.Pd	18-10-2023	17-10-2023	AC di ruang Tata Usaha mati tiba-tiba dan tidak bisa menyala kembali.	Sekretariat Utama	Kosong			
Beni Arbianto	12-10-2023	09-10-2023	tiba tiba mati setelah dinyalakan, dan tidak bisa dinyalakan kembali	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	
Agus Suherman	18-09-2023	18-09-2023	Tune UP, Spooring dan Balancing, Ganti Coolant Radiator, Ganti Oli Mesin dan Oli Gardan	Sekretariat Utama	Kosong		Disetujui	
Beni Arbianto	31-07-2023	31-07-2023	servis rutin ganti oli mesin oli gardan, ganti filter oli, spuring balancingganti wiper depan 1 set	Sekretariat Utama	Kosong		Proses Pengajuan	

Gambar 3. 78 Tangkapan Layar Siroum Data Pemeliharaan APD Tahun 2023

B. DATA PEMANFAATAN EMAIL *CORPORATE* (*MAIL.POM.GO.ID)* BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan selalu melalukan anjuran penggunaan email setiap bulan melalui What'sApp Group, kegiatan ini penting bagi kami agar dapat mendongkrak indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Hasilnya nilai indeks pemanfaatan *email corporate (mail.pom.go.id)* di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan per Triwulan sebagai berikut:

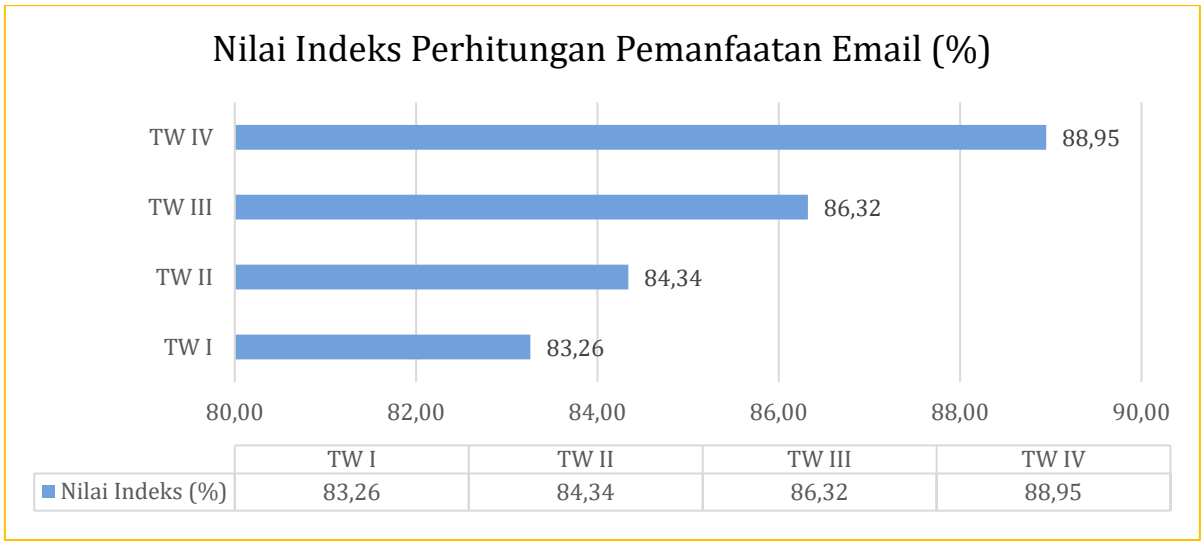

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Nilai Indeks (%)	83,26	84,34	86,32	88,95

Gambar 3. 79 Indeks Pemanfaatan per Triwulan

Sedangkan data nilai indeks pemanfaatan per Bulan, Pegawai Rorenkeu memporel trend kenaikan selama sepanjang tahun 2023, Adapun data tersebut digambarkan pada diagram di bawah ini:

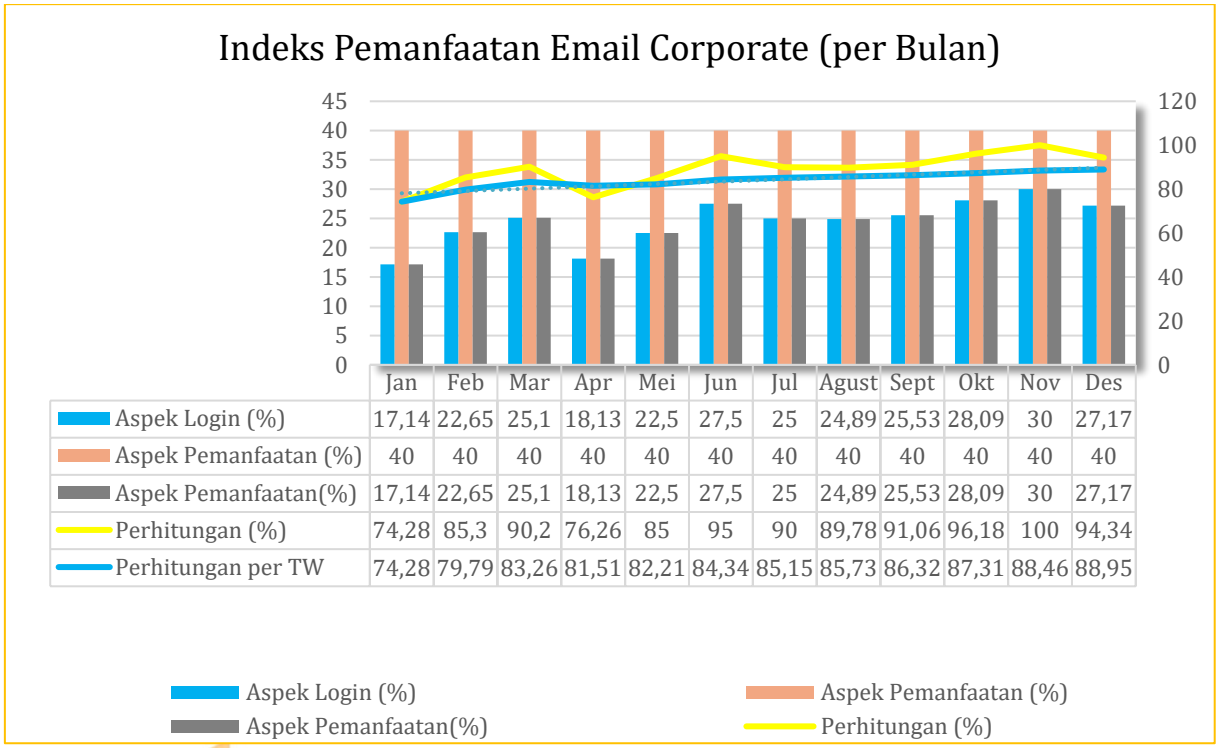

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Aspek Login (%)	17,14	22,65	25,1	18,13	22,5	27,5	25	24,89	25,53	28,09	30	27,17
Aspek Pemanfaatan (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan(%)	17,14	22,65	25,1	18,13	22,5	27,5	25	24,89	25,53	28,09	30	27,17
Perhitungan (%)	74,28	85,3	90,2	76,26	85	95	90	89,78	91,06	96,18	100	94,34
Perhitungan per TW	74,28	79,79	83,26	81,51	82,21	84,34	85,15	85,73	86,32	87,31	88,46	88,95

Gambar 3. 80 Indeks Pemanfaatan Email Rorenkeu 2023

Rata-rata Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sepanjang tahun 2023 adalah **2,75** setiap bulan memenuhi target bulanan yaitu **2,5**, Adapun grafiknya sebagai berikut:

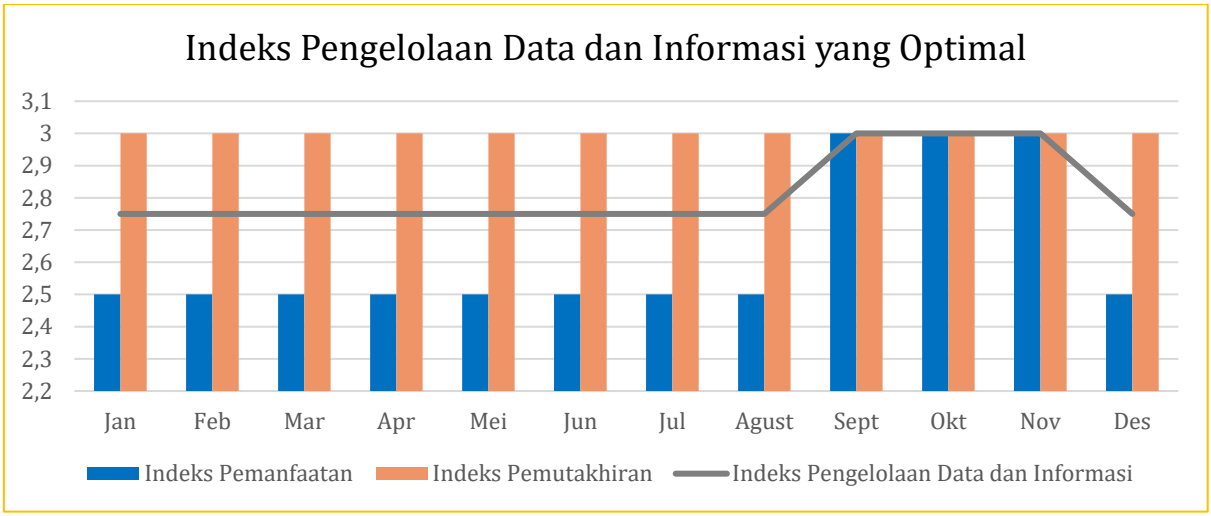

Gambar 3. 81 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Rorenkeu selama Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN 8:
TERKELOLANYA KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

IKU 13: TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 13 adalah:

A. SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN TA 2024

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2024, BPOM telah melewati beberapa tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Untuk itu perlu segera dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA- K/L Pagu Anggaran TA 2024 dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM, pertemuan ini adalah rangkaian pertama dalam melakukan penyusunan RKA-K/L tahun 2024 dimana seluruh Satker akan diminta melakukan penyusunan KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan untuk selanjutnya akan dilakukan penelaahan verifikasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP.

Hal-hal yang perlu disesuaikan, disempurnakan atau perlu diklarifikasi dengan unit Pusat dan UPT BPOM terkait dalam rangka penyusunan RKA-K/L TA 2024. Untuk itu telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran yang mengundang PPK dan operator Aplikasi RKA-K/L.

Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024 bertujuan untuk menyusun RKA-K/L masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung dan Penelaahan RKA-K/L TA 2024 oleh tim Biro Perencanaan dan Keuangan.

Output dari pertemuan ini adalah himpunan data elektronik RKA-K/L dan Data Dukung Tahun Anggaran 2024 seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM.

Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024 dilaksanakan mulai 2 – 3 Agustus 2023 bertempat di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi, dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan peserta terdaftar dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama.

B. SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN TA 2024

Pada pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024 yang lalu, telah diperoleh data dukung yang telah disesuaikan sesuai PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta hasil evaluasi penelaahan RKAKL yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu perlu segera dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM serta menyusun KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan pada saat penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP.

Pertemuan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 bertujuan untuk menindaklanjuti proses penyusunan RKA-K/L sesuai penajaman program dan kegiatan dan melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung, dan Desk RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 oleh APIP BPOM.

Output dari pertemuan ini adalah dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Data Dukung TA 2024 Satker Pusat dan Satker Balai Besar/Balai POM/Loka POM serta tersusunnya DIPA TA 2024 masing-masing unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dokumen ini selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan diterbitkannya Satuan Alokasi Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan DIPA Badan POM.

Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2024 dilaksanakan mulai 3 – 5 Oktober 2023 bertempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan peserta terdaftar dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama.

Gambar 3. 82 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2024, Jakarta, 3 – 5 Oktober 2024

LEMBAR SENGAJA KOSONG

BAB IV
PENUTUP

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646 Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta rorenkeu@pom.go.id @birorenkeu.bpom

BAB 4:
PENUTUP

Sepanjang tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM yaitu Obat dan, "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Pada laporan tahunan 2023 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 8 Sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu:

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas.
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.
3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM.
5. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP
6. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.
7. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.
8. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
10. Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan.
11. Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan.
12. Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dari ketiga belas indikator, satu indikator telah *exclude* pada tahun 2023 karena indikator tidak dihitung kembali di akhir tahun, 3 indikator mendapat kriteria **Cukup**, 2 indikator kriteria **Baik**, dan 7 diantaranya memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

Sebagian besar kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf dengan upaya seoptimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti kurangnya tenaga SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diharapkan kedepan, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal.

LEMBAR SENGAJA KOSONG

MMXXIII

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPOM

LAPTAH 2023

1500533 HALOBPOM

021-424-1646

rorenkeu@pom.go.id

https://sites.google.com/view/rorenkeu-bpom/